



International
Labour
Organization



British Embassy
Jakarta

► Manual:

Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi



Skills
for prosperity

▶ **Manual:**

Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

2022

Hak Cipta © International Labour Organization 2022
Terbitan pertama 2022

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional mendapatkan hak cipta menurut Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Namun demikian, kutipan singkat dari publikasi dapat direproduksi tanpa izin, dengan syarat bahwa sumbernya disebutkan. Untuk hak reproduksi atau terjemahan, permintaan harus diajukan ke Publikasi ILO (Hak dan Perizinan), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Swiss, atau melalui email: rights@ilo.org. Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan tersebut.

Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan tersebut. Perpustakaan, institusi, dan pengguna lain yang terdaftar di organisasi hak reproduksi dapat membuat salinan sesuai dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi www.ifrro.org untuk menemukan organisasi dengan hak reproduksi di negara Anda.

ISBN: 9789220386859 (web PDF)

Penunjukan yang digunakan dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyajian materi di dalamnya tidak menyiratkan ungkapan pendapat pihak Kantor Perburuhan Internasional dalam hal apapun mengenai status hukum negara, wilayah atau wilayah mana pun, atau otoritasnya, atau mengenai batas perbatasannya.

Tanggung jawab atas pendapat yang diungkapkan dalam artikel, kajian, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulisnya, dan publikasi ini tidak merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas pendapat yang disampaikan di dalamnya.

Rujukan untuk nama perusahaan dan produk dan proses komersial tidak menyiratkan dukungan Kantor Perburuhan Internasional kepada mereka, dan kegagalan untuk menyebutkan perusahaan, produk komersial, atau proses tertentu bukanlah tanda ketidaksetujuan.

Informasi tentang publikasi ILO dan produk digital dapat ditemukan di: www.ilo.org/publns.

Penafian

Manual ini merupakan pengembangan dari pedoman dan manual yang berjudul Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Manual ini mengalami adaptasi substansi sesuai dengan hasil diskusi kelompok terarah (DKT) tahun 2022 yang telah dilakukan di empat politeknik (Politeknik Negeri Batam/Polibatam, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya/PPNS, Politeknik Maritim Negeri Indonesia/Polimarin, dan Politeknik Negeri Manado/Polimanado). DKT melibatkan kelompok pendidik, kelompok tenaga kependidikan, mahasiswa, petugas keamanan, dan petugas kebersihan kampus.

Hasil DKT kemudian diolah menjadi substansi baru yang terdiri dari integrasi, pengarusutamaan GEDSI, dan kesiapan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Panduan bersumber pada Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan, Rekomendasi ILO No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan, Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), dan Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS.

Manual pelatihan ini telah dipraktikkan di empat politeknik, yakni Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin), dan Politeknik Negeri Manado (Polimanado). Untuk mendukung kepentingan Pemerintah Indonesia lebih luas dan berpartisipasi pada peningkatan kualitas dan penyelamatan kehidupan generasi muda, manual pelatihan ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk seluruh pendidikan tinggi di Indonesia.



PERINGATAN PEMICU!

Manual ini menyertakan peringatan pemicu pada setiap contoh kasus lapangan untuk mengantisipasi jika muncul pengalaman traumatik pada pembaca, peserta pelatihan, dan/atau fasilitator. Jika perasaan tidak nyaman seperti cemas, panik, rasa takut, dan masalah lainnya terjadi sangat disarankan untuk segera ambil tindakan pencegahan dan mencari pertolongan.

▶ Tim penyusun

Penanggung jawab	: Michiko Miyamoto
Pengarah	: Mary Kent Irfan Afandi
Penulis utama	: Kekek Apriana Fathur Rozi
Kontributor	: Politeknik Negeri Batam (Polibatam) Shinta Wahyu Hati.S.Sos.M.AB Winanda Wahana Warga Dalam, S.E., M. Acc Diah Amalia, SE. M.AK, Ak, Salmu Fajri, S.Tr.Ak Qoriatul Fitriyah, S.T., M.Sc. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) Rina Sandora, S.T., M.T., CBMCP., C.HI.PSP Aditya Maharani, S.Si., M.T, dan Nurul Hidayati, S.S., M.M., Politeknik Negeri Manado (Polimanado) Selvie.R.Kalele,Se.,M.Si, Jolly Turangan,SH.,M.Hum Radjab Djamali, SE.,M.Si, Deisy Ch.Andih, SE., M.Si Merryany Th.Bawole,SH.,MH. Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) Ari Ani Dyah Setyoningrum,M.Si Dhesi Wulan Sari, S.Pd., M.Pd Dra. Septina Dwi Retnandari, MA.
Peninjau naskah	: Lusiani Julia
Penyunting naskah	: Gita Lingga Budi Setiawati Ayunda Pratama
Desain dan tata letak	: Gery Paulandhika

▶ Daftar isi

▶ Tim penyusun	iv
▶ Daftar Isi	v
▶ Daftar tabel	vi
▶ Daftar gambar	vi
▶ Pengantar	1
A. Jadwal	3
B. Lembar soal pelatihan	5
C. Lembar evaluasi	8
D. Dinamika kelompok	10
▶ Bagian I: Makna kontekstual pengarusutamaan GEDSI	14
Pelajaran I. Mengamalkan GEDSI, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi	14
Pelajaran II. Konsep dan pentingnya pengarusutamaan GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi	22
Pelajaran III. Integrasi GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi	26
▶ BAGIAN II: komponen utama pencegahan dan penanganan kekerasan seksual	29
Pelajaran IV. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual di kampus	29
Pelajaran V. Pengurangan resiko kekerasan seksual dan perubahan perilaku sesuai dengan dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021	34
Pelajaran VI. Menciptakan lingkungan yang kondusif	38
▶ BAGIAN III: Alur dan POS PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi	42
Pelajaran VII. Alur dan POS PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi	42
Pelajaran VIII. Simulasi POS PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi	46
▶ Evaluasi	57
▶ Penutupan	57
▶ Daftar pustaka	58

▶ Daftar tabel

Table 1.	Rujukan materi GEDSI dan PPKS	1
Table 2.	Jadwal pelatihan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi	3
Table 3.	Peralatan pelatihan	10
Table 4.	Daftar periksa standar minimal pengarusutamaan GEDSI	23
Table 5.	Integrasi GEDSI dalam pengarusutamaan	27
Table 6.	Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual	37
Table 7.	Daftar POS	44
Table 8.	Rencana tindak lanjut	56

▶ Daftar gambar

Gambar 1.	Spektrum kekerasan seksual	33
Gambar 2.	Usulan alur penanganan 1	43
Gambar 3.	Usulan alur penanganan 2	44

► Pengantar

Manual pelatihan ini disusun untuk meningkatkan kapasitas para fasilitator, pengelola program GEDSI, Satgas PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, seluruh tenaga kependidikan, mahasiswa, dan profesional lainnya dalam mengembangkan respons yang efektif dan komprehensif terhadap tantangan-tantangan GEDSI dan PPKS.

Manual pelatihan merupakan paket lengkap dari panduan dengan judul yang sama dan dirancang sebagai dasar pelatihan yang difasilitasi oleh fasilitator maupun belajar mandiri. Pengembangan manual pelatihan ini didukung oleh *ILO-Skills for Prosperity in Indonesia (SfP)* dengan bantuan dana dari Pemerintah Inggris.

Manual pelatihan ini menggunakan pendekatan orang dewasa yang memiliki karakter, mempunyai pengalaman yang dapat menjadi pengetahuan bersama, nilai-nilai, dan memandang semua peserta maupun fasilitator adalah orang-orang yang unik dan harus dihargai. Proses belajar tidak hanya ditentukan oleh fasilitator melainkan oleh pengalaman seluruh peserta. Fasilitator bertugas untuk memastikan bahwa seluruh peserta terlibat dalam diskusi, memastikan proses simulasi, pembahasan kasus, penugasan, mengatur partisipasi, dan mengolah pengetahuan bersama.

Selain perspektif peserta, pengolahan pengetahuan juga berasal dari berbagai rujukan yang mendukung peningkatan pengetahuan akan pengarusutamaan GEDSI dan PPKS. Rujukan materi yang perlu dipersiapkan agar mendukung jalannya pelatihan:

► Tabel 1. Rujukan materi GEDSI dan PPKS

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Pelecehan di Lingkungan Kerja, berdasarkan Konvensi ILO No.190 (dan Rekomendasi ILO No. 206).
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Pendidikan Tinggi.	Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (ILO, No. 111).
Peraturan Sekretaris Jenderal (Pesesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi.	Rekomendasi HIV dan AIDS, 2010 (ILO, No. 200).

Manual ini disertai komponen-komponen pelatihan yang terdiri dari:
Pengantar

- a. Jadwal
- b. Lembar Tes
- c. Lembar Evaluasi
- d. Dinamika Kelompok (Perkenalan, Aturan Main, dan Tujuan Pelatihan)

Bagian I. Makna kontekstual

1. Pelajaran I. Mengamalkan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi.
2. Pelajaran II. Konsep dan pentingnya GEDSI di lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi.
3. Pelajaran III. Integrasi GEDSI di lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi.

Bagian II. Komponen utama pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

1. Pelajaran IV. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual di kampus.
2. Pelajaran V. Pengurangan risiko kekerasan seksual dan perubahan perilaku sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.
3. Pelajaran VI. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk warga kampus.

Bagian III. Alur dan prosedur operasional standar PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

1. Pelajaran VII. Alur penanganan kasus di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
2. Pelajaran VIII. Prosedur operasional standar (POS) PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

Penutup

Rencana tindak lanjut

A. Jadwal

► Tabel 2. Jadwal pelatihan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

Hari pertama	
Waktu	Kegiatan
08.00 - 08.15	Pendaftaran dan administrasi pelatihan
08.15 - 09.00	Pembukaan, sambutan, dan tes awal
09.00 - 10.00	Dinamika kelompok (perkenalan, aturan main, dan tujuan pelatihan)
10.00 - 10.15	Istirahat pagi
10.15 - 11.00	Mengamalkan GEDSI dan PPKS di lingkungan perguruan tinggi
11.00 - 11.45	Mengamalkan GEDSI dan PPKS di lingkungan perguruan tinggi (lanjutan)
11.45 - 12.30	Mengamalkan GEDSI dan PPKS di lingkungan perguruan tinggi (lanjutan)
12.30 - 13.30	Istirahat, sholat, dan makan siang
13.30 - 14.15	Pentingnya pengarusutamaan GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi
14.15 - 15.00	Pentingnya pengarusutamaan GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi (lanjutan)
15.00 - 15.15	Istirahat sore
15.15 - 16.00	Pembahasan kasus
16.00 - 16.45	Penerapan integrasi GEDSI
16.45 - 17.00	Pengakhiran hari pertama
Hari kedua	
Waktu	Kegiatan
08.00 - 08.30	Refleksi pagi
08.30 - 09.00	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual di kampus.
09.00 - 10.00	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual di kampus (lanjutan)

Waktu	Kegiatan
10.00 - 10.15	Istirahat pagi
10.15 - 11.00	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual di kampus (lanjutan)
11.00 - 11.45	Pengurangan risiko kekerasan seksual dan perubahan perilaku sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021
11.45 - 12.30	Pembahasan dan diskusi kelompok
12.30 - 13.30	Istirahat, sholat, dan makan siang
13.30 - 14.15	Pengurangan risiko kekerasan seksual dan perubahan perilaku sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 (lanjutan)
14.15 - 15.00	Pengurangan risiko kekerasan seksual dan perubahan perilaku sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 (lanjutan)
15.00 - 15.15	Istirahat sore
15.15 - 16.00	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk warga kampus
16.00 - 16.45	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk warga kampus (lanjutan)
16.45 - 17.00	Pengakhiran hari kedua

Hari ketiga

Waktu	Kegiatan
08.00 - 08.30	Refleksi pagi
08.30 - 09.00	Pembahasan kasus sesuai dengan empat bidang PPKS
09.00 - 10.00	Pembahasan alur dan penanganan kasus.
10.00 - 10.15	Istirahat pagi
10.15 - 11.00	POS PPKS sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 386/P/2019
11.00 - 11.45	POS PPKS sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 386/P/2019 (lanjutan)
11.45 - 12.30	Simulasi POS GEDSI dan PPKS

Waktu	Kegiatan
12.30 - 13.30	Istirahat, sholat, dan makan siang
13.30 - 14.15	Lanjutan simulasi POS GEDSI dan PPKS
14.15 - 15.00	Monitoring dan evaluasi
15.00 - 15.15	Istirahat sore
15.15 - 16.00	Tes akhir dan rencana tindak lanjut
16.00 - 16.45	Pengakhiran pelatihan dan penutupan
16.45 - 17.00	Administrasi

B. Lembar soal pelatihan

Soal Tes Pilihan Ganda
Pelatihan GEDSI dan PPKS di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Hari..... Tanggal.....

Nama peserta		
Jabatan *Pilih yang sesuai	a. Dosen b. Tenaga kependidikan c. Mahasiswa	
Program studi		Nama pendidikan tinggi:
TES AWAL		TES AKHIR

1. Mempelajari konsep GEDSI diperlukan untuk...
 - a. memperkuat budaya patriarki pada kelompok rentan agar sesuai norma masyarakat.
 - b. mengatur perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas dalam berperilaku dan menekan keberagaman.
 - c. mendukung kesetaraan pada semua dimensi termasuk pendidikan dan memastikan tidak ada yang tertinggal.
 - d. meningkatkan pengetahuan gender, budaya dan norma yang sesuai dengan kehendak masyarakat luas

2. Perlakuan adil memberikan hal-hal berikut, kecuali...
 - a. sistem kelas sosial
 - b. hak dan kewajiban
 - c. kesempatan yang sama
 - d. kesempatan yang berbeda
3. Contoh sederhana integrasi GEDSI dalam manajemen data adalah....
 - a. absensi tanpa informasi jenis kelamin, usia, dan disabilitas.
 - b. memasukan informasi data pilah dan disabilitas peserta didik pada informasi data.
 - c. kebijakan dengan kata sandi dengan nama laki-laki dan perempuan.
 - d. mempersulit data dengan tidak menyertakan asal daerah, suku, dan agama.
4. Mengapa GEDSI penting dalam dunia pendidikan vokasi di Indonesia?
 - a. Pendidikan vokasi menciptakan dan mengembangkan teknologi beragam produk untuk kepentingan kelompok tertentu.
 - b. Filosofi pendidikan vokasi bertujuan untuk menguasai teknologi yang mendukung interaksi kerja kelompok perkotaan.
 - c. Kepentingan pribadi dan kelompok menjadi kunci dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan aksi.
 - d. Mengurangi kesenjangan, berkontribusi pada kesetaraan gender, dan inklusi sosial.
5. Kerangka untuk membentuk masa depan dunia kerja berdasarkan martabat penghargaan, bebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan dicantumkan dalam ...
 - a. Rekomendasi ILO No. 187
 - b. Konvensi ILO No. 190
 - c. Konvensi ILO No. 200
 - d. Rekomendasi ILO No. 100
6. Berikut termasuk kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, kecuali
 - a. kekerasan verbal
 - b. konseling antar individu
 - c. kekerasan non fisik dan fisik
 - d. kekerasan melalui teknologi informasi dan komunikasi
7. Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui empat bidang berikut ini:
 - a. kampanye, tata kelola, partisipasi, dan pendampingan.
 - b. pendampingan, perlindungan, penerapan sanksi administratif, dan pemulihan korban.
 - c. pemulihan korban, informasi strategis, organisasi, dan manajemen.
 - d. perlindungan, tata kelola, partisipasi, dan organisasi kampus.

8. Sengaja mengecualikan perempuan, laki-laki, kelompok rentan, penyandang disabilitas, atau kelompok lainnya disebut...
 - a. kerangka program
 - b. penghargaan spesifik
 - c. diskriminasi
 - d. fakta kehidupan
9. Menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, yang bukan termasuk kategori korban adalah...
 - a. pendidik dan warga kampus
 - b. tenaga kependidikan
 - c. terlapor
 - d. mahasiswa
10. Berikut adalah contoh proses menyamakan persepsi dan pemahaman GEDSI untuk mendukung pendidikan vokasi yang berperspektif GEDSI, kecuali...
 - a. indikator GEDSI dan peran dalam perencanaan dan penganggaran.
 - b. pengarusutamaan GEDSI dalam pendidikan vokasi.
 - c. jalur tangga khusus yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
 - d. integrasi GEDSI pada kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
11. Berikut termasuk prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kecuali...
 - a. melindungi nama baik pendidikan tinggi
 - b. kepentingan terbaik bagi korban
 - c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang
 - d. konsisten dan jaminan tidakberulangan
12. Empat metode dalam mempertimbangkan GEDSI pada pengarusutamaan di lingkungan pendidikan vokasi adalah...
 - a. pemetaan, tinjauan pustaka, kebijakan, dan partisipasi.
 - b. tinjauan pustaka, adanya tim GEDSI, wawancara dengan informan kunci di kampus, analisis dan konsultasi teknis.
 - c. sesi khusus diskusi GEDSI, manajemen informasi, partisipasi, dan pendanaan.
 - d. lokakarya, simulasi, webinar, dan dialog.
13. Politeknik sebagai pendidikan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui...
 - a. proses dialog dengan pemerintah daerah dan jaringan di tingkat provinsi.
 - b. penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas, dan pembelajaran.
 - c. penguatan sistem rujukan dan pelaporan ke sosial media.
 - d. integrasi dengan layanan satu atap atau satu pintu yang tersedia di daerah.

14. Peran mahasiswa dalam pencegahan kekerasan seksual adalah sebagai berikut, kecuali...
 - a. berperan serta membatasi pertemuan antara pendidik dan tenaga kependidikan terutama di luar kampus.
 - b. berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.
 - c. menyebarluaskan kasus dan informasi tentang korban ke sosial media.
 - d. terlibat sebagai anggota Satgas PPKS.

15. Pendampingan sesuai Pasal 11 Ayat 1 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 terdiri dari ...
 - a. advokasi, konseling, bantuan pembiayaan pelunasan hutang, kesadaran, dan rujukan pada pengasuhan.
 - b. konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani.
 - c. bimbingan skripsi, bimbingan rohani, bimbingan pendampingan, bimbingan penugasan magang, dan bimbingan studi.
 - d. program kelompok pemberdayaan, program temu korban dan pelaku, program asistensi sosial kemasyarakatan, dan program usaha kelompok.

C. Lembar evaluasi

Evaluasi Harian
Pelatihan GEDSI dan PPKS di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Hari	Tanggal

Berikan penilaian sesuai kriteria berikut ini:

1. Sangat Setuju
2. Setuju
3. Netral
4. Tidak Setuju
5. Sangat Tidak Setuju

Makna materi pelatihan					
Pertanyaan	1	2	3	4	5
Pelatihan ini mampu meningkatkan pengetahuan saya tentang GEDSI dan PPKS.					
Pelatihan ini mampu meningkatkan keterampilan saya untuk berbicara tentang GEDSI dan PPKS.					
Pelatihan ini mampu meningkatkan peran saya dalam GEDSI dan PPKS.					
Pelatihan ini relevan dengan pekerjaan dan atau kegiatan saya sehari-hari.					
Topik materi yang paling berkesan menurut saya adalah					
Apakah anda memiliki saran untuk perbaikan materi dan metode pada hari ini?					

Tim pelatih dan panitia					
Pertanyaan	1	2	3	4	5
Para pelatih/fasilitator percaya diri dalam membawakan materi.					
Metode yang digunakan bervariasi dan menarik.					
Pelatih/fasilitator berpengetahuan luas tentang GEDSI dan PPKS.					
Panitia pelatihan profesional dalam penyelenggaraan pelatihan.					
Apakah anda memiliki saran untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelatihan?					

Kesan keseluruhan					
Pertanyaan	1	2	3	4	5
Apakah secara keseluruhan pelatihan GEDSI dan PPKS ini berhasil?					
Saya akan merekomendasikan orang lain atau pendidikan tinggi lainnya menyelenggarakan pelatihan ini.					

D. Dinamika kelompok

Persiapan pelatihan

Gambaran umum

Dinamika kelompok adalah kunci awal keberhasilan sebuah pelatihan. Seorang fasilitator harus memastikan perlengkapan pelatihan, formasi ruangan, materi pelatihan, formulir mulai dari soal tes, formulir evaluasi, dan buku paket pelatihan (panduan dan manual) telah tersedia.



Pastikan di ruangan sudah tersedia peralatan pelatihan yang terdiri dari:

► **Tabel 3. Peralatan pelatihan**

Jadwal pelatihan	Gunting
Lembar soal tes awal dan akhir	Penggaris
Lembar evaluasi harian	Coklat atau snack untuk kado permainan
Flipchart/Plano	Air mineral
Spidol besar 3 warna (hitam, biru, merah) dan masing-masing 5 buah.	Layar LCD dan LCD
Pulpen	Kursi dan meja berbentuk , tiga tripod, papan kertas plano
Buku catatan	HVS
Tanda pengenal peserta	Selotip/lakban kertas
Mic	Metaplan warna-warni
Daftar absen peserta	Buku paket bacaan
Spanduk	

Pembukaan, tes awal, dan dinamika kelompok

Pembukaan

1. Sambutlah peserta ke ruang kelas.
2. Bagikan Jadwal.
3. Secara singkat jelaskan bahwa pembukaan resmi sesuai jadwal akan dimulai.
4. Pelatihan pengarusutamaan GEDSI dan PPKS secara resmi dibuka.
5. Proses ini dilakukan bersama panitia dan diikuti seluruh peserta.
6. Doa pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan utama, laporan panitia, dan penyerahan sesi ke fasilitator
7. Pembukaan resmi selesai.

Tes awal

1. Pelaksanaan tes awal sebelum pelaksanaan pelatihan untuk mengukur kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta.
2. Pastikan seluruh peserta mendapatkan lembar soal awal atau mengisi tautan yang telah disediakan.
3. Setelah semua mendapatkan lembar soal tes awal, proses mengikuti tes dimulai.
4. Waktu yang diberikan 20 menit.
5. Setelah semua peserta sudah menjawab soal, jawaban dikumpulkan dan dihitung. Hal yang sama juga untuk tes yang dilakukan dengan mengisi tautan. Pastikan semua telah mengerjakan tes awal dan mengumpulkan/mengirimkannya.
6. Absen cepat dengan menghitung jumlah peserta sesuai dengan absensi.

Dinamika kelompok

Lakukan semua dengan riang gembira dan optimalkan energi positif



Perkenalan

1. Tujuan perkenalan adalah agar peserta saling mengenal satu sama lain sehingga tercipta suasana yang akrab melalui kegiatan perkenalan.
2. Pastikan bahwa perkenalan penting untuk saling mengenal satu sama lain, fasilitator dengan peserta, peserta dengan fasilitator dan fasilitator dengan penyelenggara.
3. Waktu perkenalan tidak lebih dari 30 menit, pertimbangkan jenis permainan yang digunakan dalam pelatihan.

4. Permainan perkenalan boleh beragam dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia.
5. Gunakan permainan pelatihan yang sederhana dan mudah diikuti.
6. Fasilitator menekankan bahwa selama pelatihan para peserta dapat saling mengenal dan mengakrabkan diri selama pelatihan berlangsung.
7. Jika permainan perkenalan nama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan orientasi pelatihan.

▶ Permainan perkenalan

Hai ini aku... dan ini kawanku...

1. Setiap peserta menuliskan nama panggilan selama 1 menit dalam metaplan dengan huruf kapital dan besar.
2. Kemudian metaplan yang telah diberi nama dikumpulkan kembali oleh fasilitator.
3. Fasilitator meminta seluruh peserta, panitia, dan tim fasilitator membuat lingkaran.
4. Fasilitator akan mengacak nama secara cepat dan membagikan bebas kepada seluruh peserta.
5. Fasilitator menunjuk salah satu peserta untuk memulai perkenalan.
6. Peserta yang ditunjuk akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kemudian menyebutkan nama orang yang tercantum dalam metaplan dan secara bergilir diikuti oleh peserta lainnya.
7. Lakukan ini sampai seluruh peserta, fasilitator, dan panitia memperkenalkan diri masing-masing.
8. Jika peserta mendapatkan namanya sendiri, fasilitator dapat menukar dengan nama peserta lainnya atau meminta peserta yang belum memperkenalkan diri memulai kembali putaran.
9. Fasilitator mengucapkan terima kasih setelah semua peserta memperkenalkan diri

Contoh :

"Halo, nama saya Tommy dari Program Studi Manajemen dan saya mendapatkan kawan bernama Ria. Halo Ria, silahkan memperkenalkan diri"

Metaplan diserahkan kepada peserta selanjutnya dan dilanjutkan dengan memperkenalkan diri.

Warna saya

1. Seluruh peserta berdiri dan membentuk lingkaran.
2. Mulai dari fasilitator memperkenalkan diri dan menyebutkan nama, warna favoritnya, alasan menyukai warna dan tunjuk dengan ceria peserta lainnya untuk memperkenalkan diri.
3. Lakukan ini hingga seluruh peserta, fasilitator, dan panitia memperkenalkan diri.
4. Fasilitator mengucapkan terimakasih setelah semua peserta memperkenalkan diri

Contoh:

" Halo nama saya Pascal, warna favorit saya pelangi seperti langit berpelangi. saya suka langit. Saya menunjuk..... silahkan memperkenalkan diri".

"Terima kasih Pascal. Halo nama saya Bunga, warna favorit saya pink dan saya suka pink karena membuat saya bersemangat".

Orientasi pelatihan

1. Setelah perkenalan, peserta dikondisikan untuk mengikuti penjelasan orientasi pelatihan.
2. Pelatihan akan dilakukan selama tiga hari mulai pukul 08.00 hingga 17.00 sesuai zona masing-masing provinsi.
3. Peserta akan bersama-sama belajar tentang pengarusutamaan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
4. Fasilitator menjelaskan alur dan jadwal pelatihan selama tiga hari dan memastikan peserta dapat mengikuti pelatihan.
5. Setelah menjelaskan alur, tanyakan kepada peserta bila ada yang kurang jelas.
6. Setelah memastikan semua peserta memahami jadwal dan alur, ajaklah peserta untuk memetakan harapan selama mengikuti pelatihan.

Pemetaan harapan

1. Fasilitator membagikan kertas metaplan ke seluruh peserta.
2. Mintalah peserta menuliskan pada kertas metaplan dengan jawaban untuk pertanyaan ini.
3. Tuliskan harapan yang ingin anda dapatkan selama proses mengikuti kegiatan.
4. Setelah menuliskan, peserta diminta untuk menempelkan metaplan di tempat yang disediakan.
5. Fasilitator dapat mengulas/meminta klarifikasi beberapa hal yang ditulis peserta dan mengingatkan akan tujuan pelatihan ini.
6. Kegiatan dilanjutkan dengan aturan main/kesepakatan.

Aturan main/kesepakatan

1. Fasilitator menjelaskan bahwa tahapan ini adalah menciptakan rasa keterlibatan peserta untuk mendukung tujuan pelatihan dengan menentukan aturan yang dibuat bersama.
2. Mendorong peserta untuk berkomitmen pada aturan yang mereka telah buat sendiri.
3. Fasilitator memberikan penjelasan tentang maksud menetapkan aturan main/kesepakatan bersama-sama.
4. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan?
5. Durasi waktu
6. Pembagian kelompok untuk penjaga waktu, ulasan harian, dan membantu fasilitator memanggil peserta ke ruangan.
7. Pastikan kesediaan seluruh peserta mengikuti aturan main/kesepakatan yang dibuat bersama.

Bagian I: Makna kontekstual pengarusutamaan GEDSI

Gambaran umum

Sesi ini menekankan pada pengetahuan dan kesadaran akan GEDSI pada kehidupan dan kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan sepanjang hayat. Peserta akan mempelajari makna kontekstual dan menemukan praktik baik yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

Pelajaran I. Mengamalkan GEDSI dan PPKS di lingkungan perguruan tinggi

Mengamalkan integrasi GEDSI menjadi pembuka untuk mempertimbangkan hubungan relasi kuasa yang tidak setara dan ketidaksetaraan yang dialami seseorang akibat identitas sosial mereka, dan bagaimana identitas ini bersinggungan dan berpengaruh pada kejadian diskriminasi kepada penyandang disabilitas dan perempuan, kasus pelecehan dan kekerasan, KBG, dan situasi kerentanan lainnya seperti kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, dan lain-lain.

A. Tujuan pelajaran I

1. Peserta dapat menggunakan kriteria standar minimal untuk menilai pengarusutamaan GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
2. Peserta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Peserta dapat mendiskusikan upaya integrasi GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

B. Metode penyampaian

Ceramah, tanya jawab, penugasan kelompok, dan presentasi kelompok.

C. Waktu

135 menit

D. Peralatan

Kertas plano, spidol besar, tiga tripod papan kertas, selotip kertas, permen lima bungkus, dan metaplan.

E. Langkah-langkah kegiatan

Kegiatan pertama: Apa itu gender?

1. Fasilitator mengkondisikan kelas untuk mengikuti sesi tentang pentingnya GEDSI dalam mendukung dan menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang setara.
2. Fasilitator mengajak peserta pada pembahasan laki-laki, perempuan, gender, dan kodrat.
3. Fasilitator mengajak peserta untuk berpartisipasi dengan berdiri dan mengikuti permainan kelas.

▶ Petunjuk kegiatan

Laki-laki, perempuan, gender, dan kodrat

1. Siapkan tiga tripod papan tulis dan pasang kertas plano.
 2. Atur peserta menjadi tiga kelompok besar dan berdiri berbaris di depan tripod.
 3. Peserta yang berdiri paling depan akan memegang satu spidol dan digunakan secara bergantian dengan cepat.
 4. Dalam satu menit minta peserta menuliskan satu kata tentang perempuan. Apa yang mereka pikirkan tentang perempuan?
 5. Fasilitator memastikan semua instruksi dapat dipahami agar kegiatan segera dimulai.
 6. Fasilitator memberikan aba-aba dan peserta menuliskan jawaban satu kata secara bergantian.
 7. Setelah satu menit, kegiatan dihentikan dan fasilitator menghitung kosakata dan memberikan ucapan selamat kepada kelompok peserta terbanyak.
 8. Fasilitator menggeser lembar plano yang telah terisi dan gunakan lembar plano yang masih kosong. Lakukan hal yang sama selama satu menit untuk menuliskan siapa itu laki-laki dalam satu kata.
 9. Hitung jumlah kata pada setiap kelompok dan berikan selamat kepada kelompok dengan kosakata terbanyak.
 10. Fasilitator melakukan pembahasan siapa itu laki-laki, perempuan, konstruksi gender, dan kodrat berdasarkan hasil jawaban peserta.
 11. Ajak peserta untuk memahami gender, kodrat, dan tantangan dari gender di dunia pendidikan.
4. Fasilitator menayangkan presentasi dan mulai membahas tentang gender dan kenapa penting dibahas di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
 5. Fasilitator membagikan lembar data pilah dan mengajak peserta untuk membahas secara cepat berapa jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di lingkungan pendidikan? Jumlah penyandang disabilitas yang menjadi dosen/pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa. Jumlah mahasiswi perempuan yang aktif berorganisasi?
 6. Fasilitator bersama peserta membahas tentang tantangan gender dan ketimpangan gender di lingkungan perguruan tinggi baik secara struktural, organisasi kemahasiswaan, dan kehidupan sehari-hari.
 7. Fasilitator melanjutkan pembahasan lebih dalam tentang pentingnya kesetaraan gender dan bagaimana mewujudkan kesetaraan di lingkungan kampus.

▶ Petunjuk kegiatan

Kesetaraan gender

1. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok menggunakan permainan pembagian kelompok.
 2. Bagikan kertas plano, selotip kertas, dan spidol di setiap kelompok.
 3. Setiap kelompok bertugas untuk membuat lima daftar usulan untuk mewujudkan kesetaraan gender di setiap program studi, organisasi kemahasiswaan, dan lingkungan kampus.
 4. Waktu pembahasan kelompok 15 menit dan kelompok dapat menempelkan hasil diskusi pada papan yang tersedia atau tripod.
 5. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain dapat bertanya dan memberikan tanggapan.
 6. Fasilitator menutup diskusi dengan pesan-pesan kunci berdasarkan hasil diskusi kelompok.
8. Fasilitator melanjutkan penayangan presentasi hingga selesai.
 9. Fasilitator menutup pembahasan kesetaraan gender dan masuk pada pembahasan penyandang disabilitas.

Kegiatan ke dua: Pelibatan disabilitas

1. Setelah kegiatan pertama selesai dan fasilitator mengkondisikan kelas untuk mengikuti sesi tentang disabilitas. Hal ini penting untuk memastikan prinsip kesetaraan termasuk *Leave No One Behind (LNOB)*.
2. Tayangkan presentasi tentang gambaran umum disabilitas di Indonesia dan siapkan peserta masuk dalam kegiatan *game of life*.
3. Fasilitator telah menyiapkan premen dan fasilitator membacakan aturan dari penugasan.

▶ Petunjuk kegiatan

Game of life

1. Saya akan membagi kertas kepada bapak/ibu yang berisi karakter (langkah ke tiga yang harus bapak/ibu bayangkan sesuai dengan instruksi).
2. Bapak/ibu bayangkan orang seperti apa yang bapak/ibu perankan, tinggalnya dimana, umurnya, dan pekerjaannya.
3. Sekarang berdasarkan karakter yang bapak/ibu bayangkan, saya akan membacakan pernyataan-pernyataan dan bapak/ibu bisa menyatakan setuju, setuju sekali, tidak setuju, tidak setuju sekali.
4. Letakan semangkok/wadah besar berisi permen
 - Setuju = +1 permen (ambil)
 - Setuju sekali = + 2 permen (ambil)
 - Tidak setuju = - 1 permen (kembalikan)
 - Tidak setuju sekali = - 2 permen (kembalikan)

Pernyataan

1. Ibu saya bahagia ketika dia mengetahui mengandung saya.
2. Ibu saya sering mengelus-ngelus perutnya, mendengarkan lagu dan cerita bahkan selalu mengatakan kata "I love you" ketika saya dalam kandungan.
3. Ibu dan keluarga besar saya sangat bahagia ketika saya lahir, kehadiran saya melengkapi kebahagiaan keluarga kami.
4. Di ulang tahun saya yang ke-5, ayah membelikan saya sepeda. Betapa senangnya saya ketika memainkan sepeda hadiah dari ayah.
5. Saya tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, pintar dan disenangi banyak teman dan guru-guru di sekolah saya.
6. Saya menyukai olahraga dan selalu menjadi yang terbaik dalam setiap perlombaan.
7. Seiring berjalannya waktu, saya akhirnya jatuh cinta dan betapa bahagianya saya ketika cinta saya pun dibalas.
8. Selesai kuliah, saya melamar di tempat kerja impian saya dan sangat bersyukur saya diterima bekerja dan menjadi bagian dari perusahaan favorit saya.
9. Dan saya menikah dengan pasangan yang mencintai dan menerima saya apa adanya.
10. Kami memiliki anak yang sangat manis, pintar dan lucu dan dia bangga memiliki orang tua seperti saya.
11. Keluarga kecil saya hidup bahagia, dan saya pun yakin selanjutnya kami bisa meraih setiap impian, harapan, dan cita-cita yang kami idamkan bersama.

4. Fasilitator bertanya jumlah permen di tangan, siapa yang mendapatkan permen banyak dan siapa yang memegang permen sedikit. Tanyakan kepada peserta, apa makna permen dan jumlah permen di tangan?
5. Fasilitator memberikan makna atas peserta yang memegang banyak dan sedikit seperti bagaimana pandangan kita melihat penyandang disabilitas di sekitar kita. Bagaimana penyandang disabilitas memiliki keterbatasan akses, fasilitas, dan dukungan dari sekitarnya? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas?
6. Berikan waktu selama 5-10 menit peserta memaknai kegiatan tersebut.
7. Sesi dilanjutkan dengan kegiatan memahami hidup sebagai penyandang disabilitas.
8. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian makna dan penanyangan presentasi.

▶ Petunjuk kegiatan

Hidup sebagai penyandang disabilitas

1. Fasilitator menjelaskan kegiatan permainan peran sebagai disabilitas.
2. Fasilitator mengajak peserta untuk ke luar ruangan menuju tempat yang telah ditentukan.
3. Fasilitator meminta peserta menjadi penyandang disabilitas dengan menutup matanya. Berilah waktu peserta untuk mempersiapkan diri dengan rencana apa yang akan dilakukan jika diminta menutup mata menuju ke ruangan yang telah ditentukan.

4. Setelah seluruh peserta siap, fasilitator memulai aba-aba dan memastikan keamanan peserta menuju ke ruangan yang telah ditentukan.
5. Peserta boleh mengakhiri atau membuka mata jika dirasa tidak sanggup menuju ke ruangan yang telah ditentukan.
6. Setelah seluruh peserta sampai ke ruangan yang ditentukan, fasilitator mempersilahkan peserta membuka mata dan memberikan waktu untuk santai sejenak.
7. Kegiatan dilanjutkan dengan refleksi tentang proses kegiatan menjadi panyandang disabilitas.

Kegiatan ke tiga: Inklusi sosial

1. Fasilitator menayangkan presentasi dan menjelaskan tentang inklusi sosial dan tanyakan pendapat peserta tentang inklusi sosial. Apa gambaran peserta tentang inklusi sosial?
2. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok dan berikan tugas kelompok untuk membahas apa itu inklusi sosial dan elemen penting dalam inklusi sosial.
3. Beri waktu 15 menit untuk berdiskusi di dalam kelompok dan bagikan kertas plano.
4. Setelah semua selesai, lakukan pembahasan dengan metode *fish bowl discussion*.
5. Fasilitator mengajak seluruh peserta untuk melakukan refleksi bersama tentang pembahasan materi ini. Apakah tujuan pembelajaran yang ditetapkan sudah tercapai? Proses ini dilakukan dengan melihat pesan-pesan kunci dan panduan.
6. Fasilitator menutup sesi ini dengan memberikan apresiasi atas keterlibatan aktif seluruh peserta.

F. Lembar tugas

- ▶ Petunjuk kegiatan
- ▶ Lembar pemantauan

G. Lembar bacaan

Sumber:

Panduan pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pesan-pesan kunci

Kesetaraan gender

- ▶ Gender adalah perbedaan sifat, peran, dan posisi perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial dan kultural atau dibentuk oleh masyarakat, dipengaruhi oleh sistem kepercayaan/agama, budaya, politik, dan sistem ekonomi
- ▶ Konsep gender bisa berubah dalam kurun waktu, konteks wilayah dan budaya tertentu
- ▶ Pembedaan ini sering menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.
- ▶ Kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan yang harus dialami semua orang, terlepas dari apakah seseorang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan.

- ▶ Meskipun perempuan dan anak perempuan biasanya mengalami tingkat diskriminasi dan ketidaksetaraan yang lebih tinggi, analisis gender dan program gender memperhitungkan situasi, pengalaman, dan peluang dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial.
- ▶ Gender berpijak pada perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, fungsi, perilaku dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi (rekayasa) sosial yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas/tidak pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat.
- ▶ Kesetaraan adalah strategi yang dapat kita gunakan dalam upaya untuk menghasilkan keadilan. Ekuitas adalah memberikan semua orang apa yang dia butuhkan untuk menjadi sukses. Kesetaraan memperlakukan semua orang sama.
- ▶ Kesetaraan bertujuan untuk mempromosikan keadilan, tetapi hanya dapat berhasil jika semua orang memulai dari tempat yang sama dan membutuhkan tingkat dan jenis dukungan yang sama.

Pengertian kunci jenis kelamin, gender, dan identitas gender

1. Gender: peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap pantas oleh masyarakat tertentu pada waktu tertentu untuk laki-laki dan perempuan. "Maskulin dan feminin" adalah kategori gender.
2. Identitas gender: ini mengacu pada identifikasi psikologis seseorang yang dirasakan secara mendalam sebagai pria, wanita, atau lainnya yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan fisiologi orang tersebut atau jenis kelamin yang ditentukan saat lahir.
3. Jenis kelamin mengacu pada jumlah karakteristik biologis yang menentukan apakah seorang individu adalah perempuan, laki-laki, dan/atau interseks.

Disabilitas

- ▶ Ini adalah interaksi antara gangguan individu (yang mungkin kehilangan penglihatan atau pendengaran, dan mungkin fisik, intelektual atau psikososial), dan hambatan di lingkungan orang itu (yang mungkin termasuk kurangnya akses ke layanan, pendidikan, pekerjaan), lingkungan binaan, diskriminatif, kebijakan, sikap, dan kemiskinan) yang menghalangi akses, partisipasi dan kontribusi yang adil dan merata dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas.

Pengertian kunci ragam disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Penyandang Disabilitas meliputi:

1. Penyandang disabilitas fisik;
2. Penyandang disabilitas intelektual;
3. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang disabilitas sensorik.

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perantaraan.

- ▶ Dalam dunia pendidikan, penyandang disabilitas dihadapkan pada berbagai hambatan. Tantangan penyandang disabilitas untuk bekerja bisa dalam beragam bentuk dan dalam berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar dunia kerja, diantaranya tingkah laku dan diskriminasi, pendidikan dan pelatihan (United Nations-ESCAP, 2015)

Inklusi sosial

- ▶ Inklusi sosial adalah sebuah kesadaran, proses, dan keadaan yang memungkinkan orang dan komunitas dapat berpartisipasi penuh di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya termasuk dalam pendidikan.
- ▶ Sering kali partisipasi dan akses seseorang atau komunitas tidak sama atau dibedakan karena identitas dan statusnya seperti jenis kelamin, agama dan kepercayaan, suku, ras, etnis, usia, disabilitas, status kesehatan (misalnya orang dengan HIV/AIDS), kebangsaan, dan pilihan politik. Disparitas antar lokasi geografis juga sangat mungkin mempengaruhi tingkat akses dan kesempatan seseorang untuk dapat berpartisipasi secara penuh.
- ▶ Secara teoritis inklusi sosial adalah proses yang memberikan daya pada individu atau kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara menyeluruh ataupun sebagian (Simarmata, 2017).
- ▶ Pendefinisian terhadap inklusi sosial tersebut merupakan kebalikan dari eksklusif sosial yaitu merupakan keadaan dimana terjadi pemisahan terhadap komunitas tertentu atau individu tertentu yang menyebabkan timbulnya dampak berupa hilangnya kemampuan dan daya pada komunitas atau individu tertentu tersebut untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dalam berbagai urusan.
- ▶ Inklusi sosial mempertimbangkan pandangan yang yakin bahwa relasi-relasi yang ada memiliki dampak terhadap inklusi sosial sehingga mampu menghimpun informasi untuk digunakan sebagai sumber daya yang dimanfaatkan sebagai pengetahuan dalam menciptakan peluang serta mendorong partisipasi semua di dunia pendidikan tinggi.

Jadi mengapa GEDSI penting?

- ▶ Tindakan pembedaan, pembatasan, dan pengucilan tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Diskriminasi tersebut menghalangi, mengurangi, merusak dan menghapus kesempatan dan kesetaraan hak kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan, orang dengan penyandang disabilitas, korban kekerasan seksual, orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan kelompok rentan lainnya dalam menikmati dan menggunakan hak-hak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Diskriminasi melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia. Sesuai dengan Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) perlu ditekankan kesetaraan mulai dari perekrutan, kesetaraan upah, iklim kerja yang ramah perempuan di institusi pendidikan, dan sektor maritim, K3, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi
- ▶ Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendikbudristek RI telah berusaha mewujudkan kesetaraan dan keadilan kesempatan bagi perempuan dan orang dengan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi untuk mengakhiri ketimpangan gender bagi perempuan di lingkungan perguruan tinggi serta menghapus berbagai hambatan bagi orang dengan penyandang disabilitas di perguruan tinggi baik calon mahasiswa, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

- ▶ GEDSI dilihat tidak hanya sebagai aspek fundamental dari HAM dan keadilan sosial, tetapi juga sebagai prasyarat untuk meningkatkan proses pendidikan dan pembangunan setiap bangsa.



- ▶ Penerapan GEDSI berdampak positif tidak hanya bagi mereka yang kurang beruntung, tetapi juga bagi peningkatan pendidikan, perekonomian dan tata kelola pemerintahan yang baik secara keseluruhan. Karena kemampuan berdaya. Tanpa partisipasi yang setara dari semua orang, termasuk mereka yang kurang beruntung, masyarakat telah kehilangan kesempatan untuk mencapai potensi penuh gagasan lembaga pemerintahan yang baik: efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- ▶ Pengarusutamaan GEDSI adalah prasyarat untuk meningkatkan proses pendidikan dan pembangunan dengan menempatkan kepedulian sosial di garis depan intervensi: Ia berkomitmen pada prinsip-prinsip LNOB dan diterapkan sebagai strategi lintas sektor pada dunia pendidikan seperti politeknik dan maritim.

Pelajaran II. Konsep dan pentingnya pengarusutamaan GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

Gambaran umum

Menjadikan GEDSI dalam setiap aspek di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi tantangan untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam upaya PPKS, sesuai peraturan Kemendikbudristek No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan. Urgensi GEDSI pada bidang pendidikan disebabkan oleh beberapa hal mulai dari 1) kesenjangan gender dan perbedaan sosial yang masih terefleksikan pada sistem pendidikan, 2) adanya kesetaraan formal yang belum memberikan kepastian pada praktik pendidikan yang berkeadilan bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, 3) sistem, model, struktur, dan budaya yang masih terjadi pada pola segregasi yang diskriminatif, 4) masih jarang ditemui sistem pendidikan yang menerapkan kesetaraan substantif, dan 5) praktik dalam dunia pendidikan masih terjadi adanya diskriminasi dan melanggar nilai-nilai gender yang subordinatif. Pada akhir pelajaran II diharapkan lingkungan pendidikan mengetahui pentingnya pengarusutamaan GEDSI menuju pendidikan yang inklusif.

A. Tujuan pembelajaran

1. Peserta dapat menggunakan kriteria standar minimal dalam pengarusutamaan GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
2. Peserta dapat melakukan analisis GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM).

B. Metode penyampaian

Ceramah, tanya jawab, tugas kelompok, dan presentasi kelompok.

C. Waktu

90 menit

D. Langkah-langkah kegiatan

Kegiatan pertama: Kenapa penting pengarusutamaan GEDSI?

1. Fasilitator menayangkan presentasi tentang pentingnya pengarusutamaan GEDSI.
2. Fasilitator mengajak peserta untuk membaca panduan Bab II Pengarusutamaan GEDSI selama 10 menit.
3. Setelah kegiatan membaca, peserta dibagi menjadi tiga kelompok dan berikan penugasan kelompok untuk membahas elemen penting GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan panduan Bab II.
4. Proses diskusi kelompok dilaksanakan selama 15 menit dan dilanjutkan dengan presentasi bergantian setiap kelompok.
5. Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan hasil kelompok, fasilitator melanjutkan dengan memberikan rangkuman atas hasil diskusi tiga kelompok.
6. Selanjutnya fasilitator menjelaskan tentang standar minimal pengarusutamaan GEDSI yang harus dipertimbangkan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
7. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk membahas bersama-sama standar minimal GEDSI dan memberikan centang/tanda dan menuliskan hasil pembahasan ke dalam kertas plano.

► Tabel 4. Daftar periksa standar minimal pengarusutamaan GEDSI

No.	Kriteria standar minimal GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi	Daftar periksa
1	Terdapat data terpilah minimal jenis kelamin, disabilitas, dan usia. Pemilahan data mempertimbangkan perempuan, kelompok mahasiswa yang berasal dari suku minoritas, suku anak laut dan kepulauan, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP Mahasiswa), dan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS Mahasiswa).	
2	Analisis GEDSI pada kurikulum, kegiatan kampus, dan kebijakan/program telah dilakukan, dengan: (a) menggunakan data terpilah baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mengidentifikasi perbedaan kebutuhan kelompok perempuan, kelompok dosen perempuan, disabilitas, KIP Mahasiswa, dan lain-lain; (3) menganalisa ketidaksetaraan dan kesenjangan antara perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dalam hal akses, manfaat, dan inklusi di kampus; (b) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesetaraan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi; (d) menganalisis strategi dan kegiatan yang berpotensi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan kesenjangan tersebut.	
3	Hasil analisis dan rekomendasi GEDSI telah digunakan untuk menyusun kebijakan/program dan kurikulum di kampus termasuk sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas.	
4	Pastikan bahwa kebijakan/program tersebut mengadopsi pendekatan yang tidak membahayakan.	
5	Terdapat tujuan program/kegiatan yang menuliskan jelas untuk meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok mahasiswa yang berasal dari suku minoritas, suku anak laut dan kepulauan, penerima KIP Mahasiswa, dan penerima KIS Mahasiswa guna meningkatkan pemberdayaan dan menentukan pilihan tepat untuk mewujudkan cita-citanya.	
6	Secara eksplisit menargetkan kelompok perempuan, kelompok mahasiswa yang berasal dari suku minoritas, suku anak laut dan kepulauan, penerima KIP Mahasiswa, dan penerima KIS Mahasiswa.	
7	Membangun kerja sama antar lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas termasuk GEDSI dengan industri, tempat kerja, LSM, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.	
8	Pemantauan menggunakan data dan indikator terpilah untuk: (1) mengukur kemajuan dan dampak yang dihasilkan kebijakan/program/kurikulum, mengacu pada tujuan GEDSI; (2) memastikan kebijakan/program/kurikulum mampu mendukung GEDSI; (3) melakukan analisa kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan integrasi GEDSI; (5) menggunakan hasil analisis (1), (2), (3), dan (4) untuk memperbaiki pelaksanaan program/kurikulum/kegiatan.	
9	Tersedia alokasi dana untuk integrasi GEDSI.	
10	Tersedia laporan program/kegiatan yang memuat integrasi GEDSI.	
Total		

8. Jika jawaban dari peserta dirasa cukup, fasilitator menjelaskan tentang tingkat perhatian terhadap integrasi GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

Keterangan: ¹⁶

Peringkat respons Kriteria Standar Minimal GEDSI

Skala 09-10: Tinggi

Menunjukkan bahwa pengarusutamaan GEDSI telah diterapkan melalui integrasi kurikulum, kebijakan/regulasi, manajemen, organisasi kemahasiswaan, anggaran, kebijakan, perencanaan, pemantauan dan sebagainya.

Skala 06-08: Sedang

Menunjukkan bahwa GEDSI masih terbatas pada 2-3 standar minimal sehingga perlu pembahasan dan perencanaan tentang konselor GEDSI dan inklusi sehingga perlu dorongan untuk memastikan hal kunci untuk memastikan komitmen.

Skala 01-05: Rendah

Menunjukkan bahwa GEDSI belum sepenuhnya diterapkan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

9. Fasilitator melanjutkan presentasi dengan membahas tentang tingkat integrasi GEDSI sebagai bentuk refleksi dan tantangan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
10. Selanjutnya fasilitator meminta peserta kembali ke kelompok dan membahas praktik baik di Indonesia dan mempelajari kebijakan di kampus tentang GEDSI serta mengaitkan kebijakan tersebut dengan kerentanan yang dapat terjadi.
11. Fasilitator memberikan waktu 15 menit untuk diskusi kelompok dan 10 menit untuk paparan kelompok.
12. Fasilitator dan peserta bersama-sama memberikan tanggapan atas hasil paparan kelompok dan menekankan pada contoh tempat kerja atau institusi yang telah memiliki kebijakan kesetaraan gender dan tempat kerja atau institusi yang belum memiliki kebijakan kesetaraan gender.

Kegiatan kedua: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) yang adil bagi perempuan dan laki-laki

1. Fasilitator melanjutkan sesi dengan menjelaskan tentang APKM dan membahasnya bersama peserta atas maksud dari APKM.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok dan bekerja untuk membahas tentang contoh-contoh dan tantangan APKM tersebut.

Akses	
Partisipasi	
Kontrol	
Manfaat	

3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikan di dalam kelompok selama 15 menit tentang kondisi di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
4. Jika waktu dan diskusi dirasa cukup, fasilitator meminta hasil diskusi di tempelkan dan masuk dalam sesi presentasi kelompok.

▶ Petunjuk kegiatan

Presentasi duta besar

1. Tunjuk perwakilan peserta sebagai duta duta besar dan sekretaris.
 2. Duta besar dan sekretaris bertugas untuk menjelaskan hasil diskusi APKM kepada anggota dari kelompok lain yang berkunjung ke negaranya (kelompoknya).
 3. Fasilitator akan membunyikan tanda setiap putaran kunjungan. Masing-masing akan berkunjung selama lima menit hingga kelompok habis.
 4. Anggota yang berkunjung bertugas bertanya secara kritis hasil diskusi APKM dan sekretaris mencatat hal-hal penting berupa masukan atau pertanyaan.
 5. Setelah proses kunjungan antar negara selesai, fasilitator meminta seluruh peserta membahas dalam kelompok besar.
 6. Fasilitator memberikan penekanan pada hasil proses diskusi.
5. Fasilitator memberikan penghargaan atas berbagai pendapat yang disampaikan dan menutup sesi jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan.

E. Lembar tugas

Kegiatan ke dua: lembar APKM yang adil bagi perempuan dan laki-laki

Akses	
Partisipasi	
Kontrol	
Manfaat	

F. Lembar bacaan

Sumber:

Panduan pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pesan-pesan kunci:

- ▶ Kesetaraan gender dan inklusi bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya di kampus adalah tujuan utama program dan merupakan dasar dalam merencanakan, melaksanakan, dan pemantauan akan menentukan hasil yang diharapkan.
- ▶ Perhatian terhadap GEDSI diberikan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dengan GEDSI sebagai fokus utama di setiap prosesnya.
- ▶ Pengarusutamaan GEDSI perlu memperhatikan analisis gender pada kebijakan, kurikulum, dan/ atau program yang telah dilakukan, dengan: (a) menggunakan data terpilah yang tersedia baik kuantitatif dan kualitatif; (b) menganalisa ketidaksetaraan dan kesenjangan antara perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya (kelompok mahasiswa khususnya perempuan, penerima KIP Mahasiswa, kelompok mahasiswa dari suku terpencil, dan kelompok mahasiswa dari kepulauan) di kampus dalam hal akses, kesempatan, manfaat, dan inklusi; (c) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesetaraan; (d) pentingnya melakukan menganalisis strategi dan kegiatan di kampus yang berpotensi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan kesenjangan tersebut.
- ▶ Prinsip-prinsip kunci yang harus diperhatikan dalam GEDSI terdiri dari:
 1. **Inklusi sebagai tujuan inti pembangunan bangsa:** Semua program ditujukan untuk menjangkau seluruh masyarakat dalam pendidikan yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan. Sehingga lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia harus memperhatikan hal tersebut untuk keberhasilan jangka panjang.
 2. **Representasi dan partisipasi:** Warga kampus yang paling mengetahui kehidupan dan keadaan mereka dalam pendidikan itu sendiri. Penting melibatkan perwakilan pendidikan, tenaga kependidikan, organisasi kemahasiswaan, maupun kelompok-kelompok di kampus dalam pengembangan kebijakan dan keputusan.
 3. **Tidak membahayakan:** Pendekatan yang “tidak membahayakan” penting agar dapat diterima oleh seluruh warga kampus dengan cara-cara yang bermartabat dan tidak merugikan pihak-pihak termasuk kelompok yang rentan di kampus.
 4. **Aksesibilitas:** Menekankan pada partisipasi dengan melibatkan seluruh warga kampus. Jika kebijakan untuk mahasiswi perempuan yang tidak berpihak, maka tidak satu pun hal di atas akan tercapai.
 5. **Data pilah:** Data terpilah menurut jenis kelamin merupakan standar minimum untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan semua jenis inisiatif lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pelajaran III. Integrasi GEDSI di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

Gambaran umum

Agar integrasi GEDSI mampu mengurangi kerentanan, kekerasan seksual, dan pencapaian pendidikan yang bermartabat, maka sangatlah penting mengintegrasikan GEDSI dalam setiap kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program serta kurikulum lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Integrasi GEDSI sesuai dengan siklus kebijakan dan program terdiri dari: 1) GEDSI pada tahap perancangan dan perencanaan, 2) GEDSI pada tahap penerapan dan pelaksanaan, 3) GEDSI pada pemantauan, dan 4) GEDSI pada tahap pelaporan, sebagaimana digambarkan pada siklus panduan tentang pengarusutamaan GEDSI.

A. Tujuan pembelajaran

Peserta mampu menerapkan integrasi GEDSI sesuai siklus kebijakan dan program di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

B. Metode penyampaian

Ceramah, tanya jawab, penugasan kelompok, dan presentasi kelompok.

C. Waktu

45 menit

D. Langkah-langkah kegiatan

1. Fasilitator menjelaskan tentang siklus kebijakan dan program GEDSI. Pendidikan tinggi dapat menggunakan siklus ini dalam pengembangan kebijakan, perencanaan kurikulum, pelaksanaan program pendidikan, dan kebutuhan organisasi lainnya.
2. Fasilitator menjelaskan penggunaan siklus yang terdiri dari, 1) GEDSI pada tahap perancangan dan perencanaan, 2) GEDSI pada tahap penerapan dan pelaksanaan, 3) GEDSI pada pemantauan, dan 4) GEDSI pada tahap pelaporan.
3. Fasilitator meminta peserta untuk membentuk tiga kelompok dan membahas penerapan siklus GEDSI dalam kegiatan pengembangan pengembangan kebijakan, perencanaan kurikulum, pelaksanaan program pendidikan, organisasi kemahasiswaan, dan kebutuhan lainnya.
4. Waktu untuk diskusi kelompok adalah 15 menit dan pembahasan akan dilakukan bersama-sama fasilitator.
5. Hasil kelompok kemudian dikaitkan oleh fasilitator dengan hasil-hasil penugasan kelompok sebelumnya agar peserta mendapatkan gambaran utuh dari proses pembelajaran tahap satu hingga tiga.
6. Fasilitator mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya pada hari pertama dan mengingatkan untuk membaca buku panduan serta mempersiapkan diri mengikuti materi PPKS hari kedua.
7. Fasilitator menutup sesi dengan membagikan lembar pemantauan pelatihan.

E. Lembar tugas

► Tabel 5. Integrasi GEDSI dalam pengarusutamaan

Contoh: Organisasi kemahasiswaan

Perancangan dan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sesuai dengan kerangka GEDSI. ▶ Kriteria standar minimal. ▶ Pertimbangan lainnya.
Penerapan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Meningkatkan peran serta perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. ▶ Partisipasi dalam pengambilan keputusan. ▶ Pertimbangan lainnya.
Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Menggunakan data pilah. ▶ Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan aksi. ▶ Melibatkan kelompok penerima manfaat. ▶ Pertimbangan lainnya.

Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Implementasi sesuai rencana. ▶ Pembelajaran praktik baik GEDSI. ▶ Pertimbangan lainnya.
-----------	---

F. Lembar bacaan

Sumber:

Panduan Bab II. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), langkah-langkah pengarusutamaan GEDSI.

Pesan-pesan kunci:

1. GEDSI pada tahap perancangan dan perencanaan

Hal-hal yang harus dipersiapkan terdiri dari:

- ▶ Mempersiapkan data pilah seluruh warga kampus.
- ▶ Menganalisis data dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik gender, penyandang disabilitas, kelompok rentan, kelompok yang terpinggirkan misalnya dari suku terpencil, penyandang disabilitas, dan kelompok penerima KIP Mahasiswa.
- ▶ Anggaran yang berperspektif GEDSI.

2. GEDSI pada tahap penerapan dan pelaksanaan

Hal-hal yang harus dipersiapkan terdiri dari:

- ▶ Memastikan bahwa kerangka waktu dan instrumen yang mendukung kegiatan telah dipersiapkan.
- ▶ Memastikan adanya pelibatan dan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, kelompok yang terpinggirkan misalnya dari suku terpencil, Orang dengan HIV/AIDS, dan kelompok penerima KIP Mahasiswa sebagai penerima manfaat.
- ▶ Memperhitungkan komposisi pelaksana program berdasarkan jenis kelamin dan melibatkan penyandang disabilitas.
- ▶ Dikembangkan berdasarkan prioritas untuk mengatasi ketimpangan program GEDSI di perguruan tinggi.
- ▶ Penggunaan anggaran.

3. GEDSI pada pemantauan

Hal-hal yang harus dipersiapkan terdiri dari:

- ▶ Indikator kebijakan yang telah ditetapkan.
- ▶ Manfaat program GEDSI
- ▶ Memperbaiki program agar lebih sensitif/responsif gender.
- ▶ Membantu dalam pengembangan rencana pemantauan yang baik.
- ▶ Mendefinisikan masukan, proses, keluaran, kesimpulan dan dampak.

4. GEDSI pada tahap pelaporan

Hal-hal yang harus dipersiapkan terdiri dari:

- ▶ Dokumentasi kegiatan (persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan).
- ▶ Laporan penggunaan anggaran.
- ▶ Penggunaan data pilah.
- ▶ Data kasus kekerasan seksual.
- ▶ Praktik baik.

Bagian II: Komponen utama PPKS

Gambaran umum

Bagian kedua ini berfokus untuk menguraikan bentuk pelecehan dan kekerasan seksual dan bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan di kampus. Rujukan materi ini adalah UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan, 2019, Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958, Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, 2010 dan Rekomendasi ILO No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan, 2019.

Pelajaran IV. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual di kampus

Kekerasan dan pelecehan merupakan ancaman terhadap martabat, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang termasuk di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam pelajaran ke IV, akan difokuskan pada pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan aksi untuk PPKS.

A. Tujuan pembelajaran

1. Peserta mampu menjelaskan pengertian dan bentuk kekerasan seksual.
2. Peserta mampu menjelaskan kerentanan kekerasan seksual dan PPKS di kampus.

B. Metode penyampaian

Pemaparan, diskusi kelompok, simulasi, dan tanya jawab.

C. Waktu

135 menit

D. Langkah-langkah kegiatan

Kegiatan pertama: kerangka konsep GEDSI dan PPKS

1. Fasilitator menyapa peserta dan menjelaskan mengapa penting pembahasan PPKS di lingkungan perguruan tinggi dengan menayangkan presentasi.
2. Fasilitator bertanya secara umum kepada seluruh peserta tentang beberapa hal sebagai berikut, misalnya mengapa kekerasan melanggar HAM, kekuasaan/relasi kuasa (apa yang membuat seseorang memiliki kuasa lebih untuk melakukan kekerasan kepada pihak yang dirasa lebih lemah?)
3. Fasilitator menggali pendapat/pemahaman peserta terkait informasi kekerasan seksual dan tantangan dalam merespons kasus di lingkungan kampus.
4. Fasilitator memberikan apresiasi atas berbagai pendapat yang disampaikan dan melanjutkan dengan penjelasan tentang konsep kerangka GEDSI dalam PPKS.

5. Fasilitator meminta peserta membuka panduan konsep kerangka GEDSI dalam PPKS dan bersama-sama membahasnya. Dorong peserta untuk memahami situasi PPKS di lingkungan kampus. Peserta harus menyadari:
 - ▶ Bagaimana kerentanan di kampus?
 - ▶ Bagaimana negara hadir untuk PPKS di kampus?
 - ▶ Kenapa penting mengetahui kerangka GEDSI dalam PPKS?
 - ▶ Bagaimana peserta harus meningkat pengetahuannya, memiliki kesadaran, dan mendukung aksi dari GEDSI dan PPKS?
6. Fasilitator memastikan peserta telah mengetahui dokumen UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Pendidikan Tinggi, Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan, 2019, Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958, Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, 2010 dan Rekomendasi ILO No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan, 2019.
7. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok dan memberikan tugas untuk melakukan simulasi sebagai berikut:

Kelompok Satu:

 - a. Lakukan praktik penyuluhan tentang Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi.
 - b. Sasaran: Seluruh pendidik di program studi teknik mesin atau program studi lainnya.

Kelompok Dua:

 - a. Lakukan diskusi kelompok Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja, 2019 dan Rekomendasi ILO No. 206 Kekerasan dan Pelecehan, 2019.
 - b. Sasaran: Tempat pemagangan

Kelompok Tiga:

 - a. Lakukan praktik dialog tentang spectrum kekerasan seksual di lingkungan kampus.
 - b. Sasaran: Organisasi kemahasiswaan.
8. Fasilitator menutup sesi kegiatan satu dan menyiapkan peserta masuk pada kegiatan kedua.

Kegiatan kedua: pelecehan, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender

1. Fasilitator menayangkan presentasi tentang pelecehan, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender yang terjadi di perguruan tinggi.
2. Fasilitator meminta peserta membaca panduan pada tabel 1 tentang pelecehan dan kekerasan seksual berdasarkan hasil diskusi kelompok terpadu (DKT) dan membahas bersama.
 - ▶ Situasi kekerasan dan lokasi kejadian.
 - ▶ Bagaimana pendapat peserta tentang kejadian pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi?
 - ▶ Apa dampak pelecehan, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender kepada korban?
 - ▶ Bagaimana mendeteksi secara dini kejadian pelecehan dan kekerasan seksual?

3. Setelah pembahasan dirasa cukup oleh fasilitator, sesi dilanjutkan dengan kegiatan pernyataan kontroversial. Fasilitator akan membacakan lembar tugas dan mintalah peserta menyatakan reaksinya, setuju atau tidak setuju dan mendiskusikan perbedaan yang muncul dalam kelompok. Tekankan perbedaan yang tercermin dalam kelompok tentang tata nilai, sikap, dan keyakinan.
4. Fasilitator meminta seluruh peserta berkumpul dan melingkar. Kemudian fasilitator menjelaskan maksud dari kegiatan ini dan fungsi dari metaplan bertuliskan setuju atau tidak setuju yang diletakkan di bawah.
5. Fasilitator akan membacakan pernyataan secara berurutan dan meminta peserta untuk setuju berkumpul di belakang metaplan setuju dan peserta yang tidak setuju berkumpul.
6. Setelah semua berada di posisi pilihan masing-masing, fasilitator menggali pendapat peserta sesuai dengan pilihannya dan mempersilahkan peserta berpindah tempat jika ada perubahan pendapat. Sesama peserta diperbolehkan saling mempengaruhi.
7. Setelah semua pernyataan selesai dibacakan dan dibahas, fasilitator memberikan makna bahwa permainan ini mengajarkan bahwa diskusi dari berbagai dimensi itu penting agar penyelesaiannya komprehensif, bahwa setiap orang punya tata nilai dari pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan pentingnya punya keberpihakan dan perspektif korban.

Kegiatan ketiga: kaitan pelecehan dan kekerasan seksual dengan kerentanan-kerentanan lainnya.

1. Fasilitator melanjutkan sesi dengan pembahasan pelecehan dan kekerasan seksual dengan kerentanan-kerentanan lainnya.
2. Fasilitator menanyakan kepada peserta apa kaitan pelecehan dan kekerasan seksual dengan kerentanan-kerentanan lainnya dan mendiskusikan bersama.
3. Untuk memperdalam pengetahuan, fasilitator meminta peserta membaca panduan dan membuka sesi tanya jawab.
4. Setelah proses sesi tanya jawab cukup, fasilitator membagi peserta menjadi dua kelompok.
 - a. Kelompok pertama: Diskusikan kerentanan lainnya dan strategi untuk menyelesaikan kerentanan tersebut secara umum.
 - b. Kelompok kedua: Kelompok diminta untuk membuat infografis tentang kerentanan dari pelecehan dan kekerasan seksual yang akan didistribusikan di kampus.
5. Fasilitator bersama peserta membahas hasil diskusi kelompok dan menutup kegiatan ketiga.

E. Lembar tugas

Lembar tugas kegiatan kedua: pernyataan kontroversial

1. Dosen senior perempuan tidak akan mendapatkan pelecehan dan kekerasan seksual di kampus.
2. Mahasiswa laki-laki dapat menjadi korban kekerasan seksual.
3. Dosen laki-laki boleh pacaran dengan mahasiswi asal beda jurusan.
4. Perempuan lebih tua boleh berpacaran dengan mahasiswi adik kelasnya.
5. Mahasiswa dengan HIV tidak dapat berkuliah di politeknik.
6. Hukuman fisik untuk menegakkan kedisiplinan adalah bagian dari pendidikan.
7. Mahasiswi diperbolehkan hamil sebelum menikah karena telah dewasa dan tidak melanggar moral.
8. Mahasiswa pelaku kekerasan yang telah selesai menjalankan hukuman pidana boleh masuk kuliah kembali.
9. Tugas Satgas PPKS adalah mengikuti pelatihan untuk peningkatan kapasitas diri saja.
10. Seorang petugas PPKS tidak mungkin melakukan kekerasan seksual.
11. Melaporkan kasus kekerasan sama saja dengan pelanggaran HAM karena membuat pelaku malu.
12. Petugas keamanan di kampus tidak mungkin melakukan pelecehan seksual.
13. Disebut pelecehan dan kekerasan seksual jika terjadi penetrasi.
14. *Cat calling* itu pujian dan bukan pelecehan.
15. Perempuan lebih sensitif sementara laki-laki lebih kuat secara mental.
16. Laki-laki boleh melakukan kekerasan seksual kepada teman dekatnya karena sudah akrab.
17. Mahasiswi boleh melaporkan kasus kekerasan seksual yang dihadapinya ke media.
18. Laki-laki boleh menangani kasus perempuan korban kekerasan seksual.
19. Proses hukum itu lama dan sebaiknya tidak perlu ditangani kasus kekerasan seksual.
20. Petugas kebersihan di kampus tidak mungkin mendapatkan pelecehan seksual.

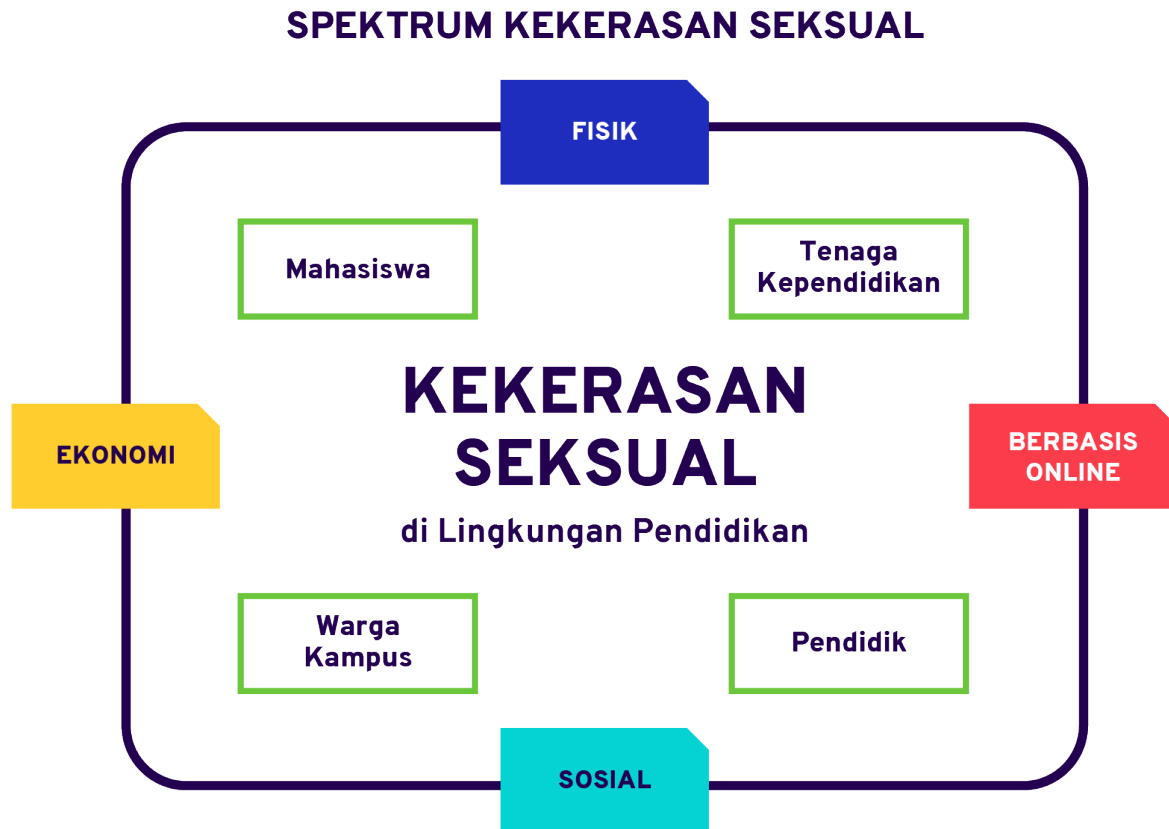
F. Lembar bacaan

Panduan Bab II. Pelecehan, Kekerasan Seksual, dan Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Pesan-pesan kunci:

- ▶ Kekerasan berbasis gender dapat terjadi pada siapapun tanpa melihat suku, budaya, umur, status dan agama.
- ▶ Kekerasan seksual dapat melibatkan spektrum fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan berbasis daring serta dapat terjadi di mana saja, termasuk perguruan tinggi.

► Gambar 1. Spektrum kekerasan seksual



- Spektrum kekerasan terdiri dari fisik, psikis, seksual berbasis daring dan sosial termasuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan kelompok rentan di kampus dapat terjadi kepada siapapun dan dilakukan oleh orang terdekat atau dikenal secara langsung. Sangat penting untuk menghapuskan relasi kuasa yang menjadi akar permasalahan dari pelecehan dan kekerasan.
- Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah istilah yang digunakan untuk mempertegas definisi dari kekerasan terhadap perempuan, seperti yang tercantum dalam Resolusi PBB No. 48/104, 20 Desember 1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
- KBG merujuk pada definisi kekerasan berbasis gender oleh Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), yang mendefinisikan KBG sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.
- Kekerasan terhadap mahasiswa ataupun perempuan dan penyandang disabilitas memiliki jenis yang beragam: termasuk fisik, seksual, psikis/emosional, kerugian ekonomi dan penderitaan lainnya yang muncul dalam bentuk ancaman, pelecehan, paksaan dan perampasan kebebasan.
- Kerentanan yang harus menjadi perhatian antara lain, dampak psikologis dan trauma, kerentanan HIV/AIDS, kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, serta dampak kekerasan seksual pada penyandang disabilitas.

Pelajaran V. Pengurangan risiko kekerasan seksual dan perubahan perilaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021

Pada pelajaran ke lima, penting untuk memulai pencegahan, pengurangan risiko kekerasan seksual, dan perubahan perilaku termasuk melakukan deteksi dini agar pelecehan dan kekerasan tidak terjadi. Sesi ini bersumber pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi, Persejjen Kemendikbudristek No 17 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, K190 ILO, dan Rekomendasi ILO No. 206.

A. Tujuan pembelajaran

1. Mengenali dan memahami Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi, Persejjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, dan Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 dan Rekomendasi No. 206 berisi tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
2. Memahami kekerasan dan dampaknya terhadap kehidupan korban.
3. Mengidentifikasi kebutuhan layanan untuk korban tindak kekerasan seksual.
4. Mendemotrasikan cara-cara pertolongan kepada korban.

B. Metode penyampaian

Presentasi, diskusi kelompok, penugasan, dan simulasi.

C. Waktu

135 menit

D. Langkah-langkah kegiatan

Kegiatan pertama: peningkatan kesadaran secara komprehensif dan kolektif

1. Fasilitator menjelaskan konsep peningkatan kesadaran GEDSI dan PPKS secara komprehensif dengan menayangkan PPT.
2. Fasilitator membahas bagaimana konsep tersebut dapat diintegrasikan di kampus.
3. Fasilitator melanjutkan dengan menjelaskan siklus kejadian pelecehan, kekerasan seksual, dan kerentanan di kampus dan tempat pemagangan/tempat kerja.
4. Fasilitator meminta peserta untuk membaca bab IV dari panduan dan melihat kerentanan yang dapat terjadi sesuai siklus.
5. Kegiatan melihat kerentanan ini penting untuk menunjukkan informasi rinci dan eksplisit yang diperlukan guna membantu mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan kelompok rentan untuk menerapkan deteksi dini kemungkinan akan terjadinya tindakan pelecehan dan kekerasan seksual di sekitar.
6. Setelah pembahasan bersama tentang peningkatan kesadaran, fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok dan setiap kelompok mengembangkan rencana dan kegiatan peningkatan kesadaran akan PPKS sesuai dengan bidang masing-masing. Format diskusi dapat dilihat dalam lembar tugas.
7. Selesai pembahasan dalam kelompok, peserta dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok di kelas besar sehingga seluruh peserta dapat melihat rencana-rencana inovasi dari kelompok lainnya.

8. Fasilitator menarik kesimpulan tentang rencana dan kegiatan peningkatan PPKS di kampus.
9. Fasilitator mengucapkan terimakasih atas partisipasi peserta dan mengingatkan bahwa hasil diskusi dapat menjadi pertimbangan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan GEDSI dan PPKS.

Kegiatan kedua: berinvestasi pada individu mahasiswa, individu pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

1. Fasilitator menjelaskan pentingnya keterlibatan warga kampus dalam PPKS dengan menayangkan PPT.
2. Kegiatan dilanjutkan dengan mengkondisikan ruangan untuk memasuki suasana teduh dan nyaman. Seluruh peserta akan membuat lingkaran tanpa membawa HP dan peralatan lainnya. Lampu ruangan dimatikan.
3. Fasilitator meminta peserta untuk menyiapkan diri pada sesi renungan dengan menyediakan diri dan memejamkan mata dengan tenang.
4. Setelah semua siap, fasilitator memutar musik dan membacakan kasus kekerasan seksual dengan penuh makna.
5. Setelah kasus dibacakan, seluruh peserta diminta membuka mata, dan tunggu sesaat hingga peserta lebih rileks.
6. Fasilitator melanjutkan dengan meminta umpan balik atas kasus tersebut.
7. Fasilitator menekan pentingnya memelihara empati dan berpihak kepada korban.



PERINGATAN PEMICU!

Kasus renungan

Renungan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan

Dua bulan lalu kita merayakan hari kekerasan seksual tanggal 8 Maret 2011 dan bertepatan dengan peringatan 100 Tahun Hari Perempuan Internasional. Dari sisi HAM, status pemenuhan HAM untuk perempuan di Indonesia masih memprihatinkan dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Komnas Perempuan memaparkan data bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara 2015-2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi atau universitas. Sebanyak 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masuk ke Komnas Perempuan dalam periode tersebut.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, bagaimana sikap kita?

Pagi itu seorang mahasiswi datang ke layanan klinik reproduksi di sebuah kota, tidak banyak yang diketahui tentang dia. Mahasiswi itu berasal dari daerah dan merantau ke kota untuk belajar dan kuliah di salah satu perguruan tinggi. Mahasiswi ini, seorang diri datang dengan kehamilan usia tiga bulan dan meminta bantuan untuk mengugurkan kandungan. Seorang konselor yang menanganinya berusaha membantu mahasiswi tersebut dengan dukungan psikologis dan menjelaskan bahwa kandungannya tidak mungkin digugurkan dan menawarkan

bantuan rumah singgah kepada korban untuk penanganan lebih lanjut. Mahasiswi tersebut memilih menolak dan mengatakan bahwa pacarnya memaksanya untuk aborsi dan jika tidak dilakukan aborsi, hubungan akan diputuskan. Mahasiswi ini ketakutan dan memutuskan pulang kembali ke indekos. Menurutnyanya lebih lanjut, pacarnya sering memaksakan hubungan seksual dan mengancam akan memutuskannya jika tidak menurutinya.

Setelah dia hamil, tiba-tiba pacarnya memaksa untuk aborsi dan sudah tiga hari menghilang. Mahasiswi tersebut baru menyadari bahwa dia tidak mengetahui identitas pacarnya sebenarnya kecuali indekos dan tempat kuliah. Sementara di dua tempat tersebut keberadaannya tidak diketahui.

Dua hari kemudian klinik reproduksi tersebut mendapatkan telpon dari polisi karena telah ditemukan seorang mahasiswi yang meninggal dunia dengan bunuh diri. Pemilik indekos dan polisi menemukan mahasiswi dengan pendarahan yang hebat pada jalur lahir akibat tusukan benda tajam dan di sampingnya terdapat kartu berobat korban.

8. Kegiatan dilanjutkan dengan memaknai kasus renungan di atas dan apa saja yang dapat dilakukan pada tahap pencegahan dan penanganan.
9. Kegiatan dilanjutkan dengan peningkatan partisipasi individu dalam keterlibatan penanganan bagi korban.
10. Fasilitator menayangkan presentasi dan membahas pentingnya partisipasi korban dan pemberdayaan korban untuk menolong dirinya sendiri.
11. Fasilitator meminta peserta berpasangan dan mengikuti instruksi berikut ini.

▶ Petunjuk kegiatan

1. Mintalah seluruh peserta berpasangan dan berhadapan.
2. Pilihlah peserta lain sesuai dengan kenyamanan diri peserta, termasuk jika beda jenis kelamin.
3. Semua peserta saling berdiri dengan kondisi santai dan bebas dari apapun.
4. Setelah semua siap, fasilitator meminta peserta saling bertatapan selama dua menit dan melakukan orientasi kepada pasangannya mulai dari dahi, mata, hidung, pipi, mulut, dan leher kemudian kembali ke mata.
5. Peserta tidak boleh memasukan tangan ke saku, tersenyum atau tertawa, dan bahkan bergurau.
6. Peserta diminta fokus kepada pasangan tanpa melihat sekitarnya.
7. Setelah dua menit, peserta diminta duduk kembali dan melanjutkan sesi.

12. Fasilitator menanyakan bagaimana proses berpasangan dan apa yang dirasakan? Mintalah beberapa peserta untuk bergantian menyampaikan proses kegiatan, apa tantangannya, dan mendiskusikannya. Layanan/bantuan apa saja yang diperlukan/berpusat pada penyintas?
13. Fasilitator memberikan kesimpulan dan menjelaskan bahwa menolong orang lain, terlebih korban harus berpusat pada korban, berpihak pada kepentingan korban, dan mengetahui kebutuhan korban dengan mendengarkan aktif.
14. Fasilitator melanjutkan menyangkan PPT sesuai bidang pendampingan dan perlindungan.
15. Lebih lanjut fasilitator mengajak peserta mendemostrasikan Layanan Bantuan Psikologi Pertama (PFA) bagi korban. Demostrasi PFA dapat menggunakan kasus-kasus pada panduan.
16. Kegiatan demonstrasi PFA dilakukan dua kali putaran dan seluruh peserta dapat bersama-sama berlatih berpasangan-pasangan.
17. Setelah demonstrasi kegiatan selesai, fasilitator menutup sesi dan mempersilahkan peserta untuk tanya jawab jika masih ada pertanyaan.

E. Lembar tugas

Lembar tugas kegiatan pertama: Peningkatan kesadaran secara komprehensif dan kolektif.

Komponen pembentuk sikap dan perubahan perilaku: afektif, kognitif, dan perilaku (*Theory of Reasoned Action* (TRA), Sheppard et al (1988)).

► Tabel 6. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

Langkah-langkah pengisian:

1. Tahap pertama, tuliskan pengetahuan yang perlu ditingkatkan pada kelompok. Misalnya pada kelompok dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga kampus lainnya.
2. Tahap kedua, berikan contoh perubahan dari peningkatan pengetahuan tersebut. Perubahan harus selaras dengan pengetahuan yang perlu ditingkatkan atau diberikan.
3. Tahap ketiga, tentukan strategi untuk PPKS. Misalnya dengan program penyuluhan, kampanye, dan/atau diskusi kelompok sebaya.
4. Tahap keempat, tuliskan hasil yang ingin dicapai dengan kegiatan peningkatan pengetahuan, perubahan, dan strategi.

Komponen	Perubahan	Strategi	Hasil
Pengetahuan/ kognitif yang diharapkan	⇒	⇒	⇒
Sikap/afektif, keterampilan yang diperlukan	⇒	⇒	⇒
Perilaku yang diharapkan	⇒	⇒	⇒

F. Lembar bacaan

Sumber:

Panduan Bab IV. Implementasi pengarusutamaan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

Pesan-pesan kunci:

- ▶ PPKS dilaksanakan dengan prinsip: 1) kepentingan terbaik bagi korban, 2) keadilan dan kesetaraan gender, 3) kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, 4) akuntabilitas, 5) independen, 6) kehati-hatian, 7) konsisten, dan 8) jaminan ketidakberulangan (Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022).
- ▶ Secara eksplisit tempat kerja sudah menyatakan komitmennya terhadap PPKS.
- ▶ Memastikan dedikasi manajemen tempat kerja terhadap keamanan dan keselamatan mahasiswa terutama mahasiswi selama pemagangan dengan memasukan pasal kerja sama antara lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dengan tempat kerja.
- ▶ Memahami dan menerapkan kebijakan sesuai dengan konvensi internasional dan nasional tentang perburuhan, migrasi, diskriminasi, dan kekerasan dan pelecehan.
- ▶ Berbagi praktik terbaik tentang cara efektif untuk mempromosikan peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan seksual, dan kerentanan HIV/AIDS di tempat kerja.
- ▶ Mempromosikan dan menghormati hak perempuan pekerja untuk berorganisasi dan menyuarakan keprihatinan mereka secara bebas, aman dan tanpa nama jika diinginkan.
- ▶ Melibatkan perempuan pekerja secara aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan program K3.
- ▶ Menciptakan tempat kerja dan lingkungan kerja aman dan sehat yang akan membantu mencegah pelecehan dan kekerasan, mendorong inklusi, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Ini dapat mencakup kegiatan kerja internal dan eksternal.

Pelajaran VI. Menciptakan lingkungan yang kondusif

Pada pelajaran enam, penting untuk membantu perguruan tinggi menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi korban dan seluruh warga kampus (mahasiswa baik perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, penerima KIP Mahasiswa, mahasiswa dari suku terpencil dan kepulauan, kelompok yang terpinggirkan dan kelompok rentan lainnya yang sedang belajar di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, mahasiswa yang sedang melaksanakan pemagangan di tempat kerja, para pendidik/dosen, para tenaga kependidikan, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan). Pendekatan PPKS secara komprehensif memerlukan pemahaman terhadap hambatan struktural yang dapat terjadi. Hambatan ini mungkin terjadi di tingkat kebijakan, perancangan program pendidikan, dan praktik pendidikan itu sendiri.

A. Tujuan pembelajaran

1. Peserta mampu melakukan penilaian lingkungan kampus yang mendukung GEDSI dan PPKS.
2. Peserta mampu menerapkan strategi menciptakan lingkungan kampus yang kondusif bagi seluruh warga kampus.

B. Metode penyampaian

Ceramah, tanya jawab, tugas kelompok, dan presentasi kelompok.

C. Waktu

90 menit

D. Langkah-langkah kegiatan

1. Fasilitator memulai sesi dengan menayangkan PPT dan selama presentasi berlangsung bangkitkan partisipasi aktif peserta dengan meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan.
2. Fasilitator menanyakan pengalaman proses menciptakan lingkungan yang mendukung di perguruan tinggi.
 - a. Apakah saat ini Satgas PPKS sudah terbentuk? Bagaimana satgas PPKS merespons setiap kasus yang dilaporkan?
 - b. Apa yang diperlukan oleh Satgas PPKS? Tim GEDSI atau kelompok kerja lainnya?
 - c. Apakah Satgas PPKS juga melibatkan korban sebagai relawan atau sudah mengorganisasi kelompok mahasiswa lainnya untuk terlibat dalam PPKS?
3. Setelah proses diskusi bersama di atas, fasilitator membagi peserta menjadi empat kelompok dan membahas beberapa skenario simulasi dan mempraktikannya di depan kelas.
4. Setiap kelompok akan mendapatkan sebuah skenario yang berbeda-beda dan waktu yang tersedia digunakan untuk simulasi. Skenario dapat dibaca pada lembar tugas.
5. Tujuan simulasi untuk menghubungkan apa yang disampaikan fasilitator dari materi hari pertama, mengembangkan keterampilan, dan memahami semua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Selama simulasi peserta dapat saling memberikan umpan balik berdasarkan pengamatan dan perbaikan.
6. Peserta diminta untuk membuat daftar yang memuat cara-cara perbaikan dalam menciptakan lingkungan kondusif.
7. Setelah selesai pembahasan, sesi pembelajaran enam dapat diakhiri dan fasilitator meminta para peserta untuk melengkapi lembar evaluasi (manual/virtual) dan mengembalikannya.

E. Lembar tugas

Lembar tugas: simulasi

Simulasi kelompok satu: Dialog sosial dengan tempat kerja.

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi di tempat pemagangan. Pendidik/dosen pendamping bersama Satgas PPKS diminta untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Lakukan pembahasan bersama tempat kerja/perusahaan mitra pemagangan untuk penanganan kasus tersebut. Penting untuk perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan menciptakan lingkungan tempat pemagangan yang berperspektif GEDSI dan anti kekerasan seksual.

- ▶ Buatlah rencana dialog sosial dan penanganan kekerasan seksual bersama tempat kerja.
- ▶ Lakukan simulasi di depan kelas.

Simulasi kelompok dua: organisasi kemahasiswaan.

Upaya pencegahan TPKS mencakup berbagai organisasi kemahasiswaan, perkumpulan keagamaan di kampus, dan jaringan kerja antar mahasiswa. Beberapa kasus kekerasan telah terjadi dan ditangani sesuai konteks. Untuk mengurangi KBG dan mencegah keberulangan, Satgas PPKS perlu merumuskan beberapa langkah penting bersama organisasi mahasiswa dan jaringan kerja antar mahasiswa.

- ▶ Buatlah rencana untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di lingkungan kampus.
- ▶ Lakukan simulasi di depan kelas dialog antar organisasi mahasiswa.

Simulasi kelompok tiga: integrasi GEDSI dan PPKS pada program studi.

Lakukan pembahasan untuk sosialisasi PPKS di program studi. Satgas PPKS membuat program untuk penyadaran dan penanganan kasus pada setiap program studi. Hal ini penting dilakukan setelah muncul kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tenaga kependidikan.

- ▶ Buatlah rencana integrasi program GEDSI dan PPKS untuk program studi.
- ▶ Lakukan simulasi penyuluhan di depan kelas.

Simulasi kelompok empat: Penjangkauan petugas kebersihan dan petugas keamanan.

Penting melibatkan petugas kebersihan dan petugas keamanan untuk deteksi dini kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini penting mengingat petugas kebersihan dan keamanan bekerja di seluruh areal kampus.

- ▶ Buatlah rencana penjangkauan dan penyuluhan untuk melibatkan petugas kebersihan dan petugas keamanan.
- ▶ Lakukan simulasi penjelasan tentang deteksi dini pencegahan kasus kekerasan seksual.

F. Lembar bacaan

Sumber:

Panduan pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

- ▶ Setiap perguruan tinggi harus memiliki peran dan komitmen dalam menetapkan GEDSI dan PPKS.
- ▶ Secara eksplisit menyatakan komitmen terhadap kesetaraan dan tidak memberikan toleransi pada pelecehan, kekerasan seksual, dan memastikan agar program pencegahan dan penjangkauan untuk seluruh warga kampus sudah diperkenalkan.
- ▶ Memperkuat program GEDSI yang telah didukung oleh ILO Indonesia dengan dukungan program Skills For Prosperity (SfP) Indonesia untuk memastikan komitmen manajemen terhadap pengembangan integrasi program GEDSI dan PPKS termasuk kode etik untuk menjunjung tinggi martabat.
- ▶ Membuka ruang dialog dengan kelompok untuk membahas strategi menghentikan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan kelompok rentan.
- ▶ Pastikan bahwa tindakan disipliner yang jelas dan efektif untuk diperkuat dan bukan tindakan kekerasan di pendidikan tinggi yang dibanyak kasus justru tidak efektif dan melanggar kekerasan.
- ▶ Berbagi praktik terbaik tentang cara efektif untuk mempromosikan peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan, dan kerentanan lainnya kepada mahasiswa baru, calon pekerja sebelum penempatan, persiapan pekerja perempuan sebelum penempatan, dan selama kontrak berlangsung.
- ▶ Mengembangkan sistem pengaduan dan rujukan untuk perundungan seperti layanan saluran siaga yang dikelola oleh tim yang telah ditunjuk.
- ▶ Menjamin adanya protokol atau POS langkah-langkah penanganan kasus termasuk penanganan perkara untuk pelaku.
- ▶ Menciptakan dan memelihara lingkungan yang kondusif, merupakan pendekatan pencegahan komprehensif memerlukan pemahaman terhadap cara mengatasi hambatan struktural bagi upaya mencari pertolongan. Hambatan ini mungkin terjadi di tingkat kebijakan, perancangan pelayanan, dan intervensi lainnya.
- ▶ Menyelaraskan kebijakan dan praktik PPKS untuk mengurangi pelecehan, kekerasan, stigma dan diskriminasi yang dialami oleh korban.
- ▶ Memastikan keberlanjutan dan konsistensi dari program kerja Satgas PPKS dan pelayanan melalui advokasi dan membangun kepemimpinan.
- ▶ Mendorong keterlibatan warga kampus dalam perancangan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, evaluasi dan kepemimpinan.
- ▶ Penjangkauan pada seluruh kelompok termasuk organisasi yang dominan laki-laki di kampus untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan.
- ▶ Anggota Satgas PPKS yang terbuka bersedia menangani masalah, mengangkat isu yang perlu dibahas, membantu menciptakan lingkungan di mana orang bebas mengatakan apa yang ada di pikiran mereka, dan mendorong pertukaran ide secara terbuka.
- ▶ Dalam iklim keterbukaan, anggota tim dapat mendengarkan dan berbicara satu sama lain tentang isu-isu yang menghambat kerja sama tim (termasuk perilaku dan sikap individu).

Bagian III: Alur dan POS PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

Gambaran umum

Bagian III dari manual ini berisi dua pelajaran tentang tinjauan terhadap kelengkapan dukungan pelaksanaan pengarusutamaan GEDSI dan penerapan PPKS termasuk praktik baik. Bagian ini juga menekankan peran vital pengarusutamaan GEDSI dan berkonsentrasi pada peran pendidikan dan layanan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dalam alur dan pengembangan POS pengaduan kasus, pencegahan, dan penanganan kasus sesuai dengan Persesjen No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

Pelajaran VII. Alur dan POS PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

A. Tujuan pembelajaran

1. Peserta mendapatkan gambaran alur dan POS layanan yang dapat dilakukan Satgas PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
2. Peserta memahami pentingnya memberikan pelayanan yang baik serta kinerja sebagai anggota Satgas PPKS.

B. Metode penyampaian

Presentasi, diskusi, dan simulasi.

C. Waktu

90 menit

D. Langkah-langkah kegiatan

1. Fasilitator menjelaskan tentang pentingnya membuat alur baik internal dan alur rujukan penanganan kasus.
2. Fasilitator bertanya kepada peserta beberapa pertanyaan terkait pengalaman mengembangkan alur layanan penanganan kasus.
3. Fasilitator menayangkan alur singkat dan alur panjang untuk penerapan PPKS di perguruan tinggi.
4. Untuk memenuhi kebutuhan spesifik alur, peserta dalam melihat alur yang telah dikembangkan untuk mendukung POS Satgas PPKS.

5. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok untuk mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam membuat alur rujukan, sistem rujukan dan jejaring kerja sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Hasil dari diskusi ini akan menjadi dasar pengembangan RTL, audiensi, dan pembuatan nota kesepahaman.

Kelompok pertama: Membuat sebuah alur internal yang sederhana. Peserta perlu mempertimbangkan hal-hal penting yang dimasukkan dalam pengembangan alur sederhana.

Kelompok kedua: Membuat kelengkapan daftar kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk rujukan layanan. Hal ini penting untuk membantu Satgas PPKS agar senantiasa memperbaharui petunjuk setiap tahunnya.

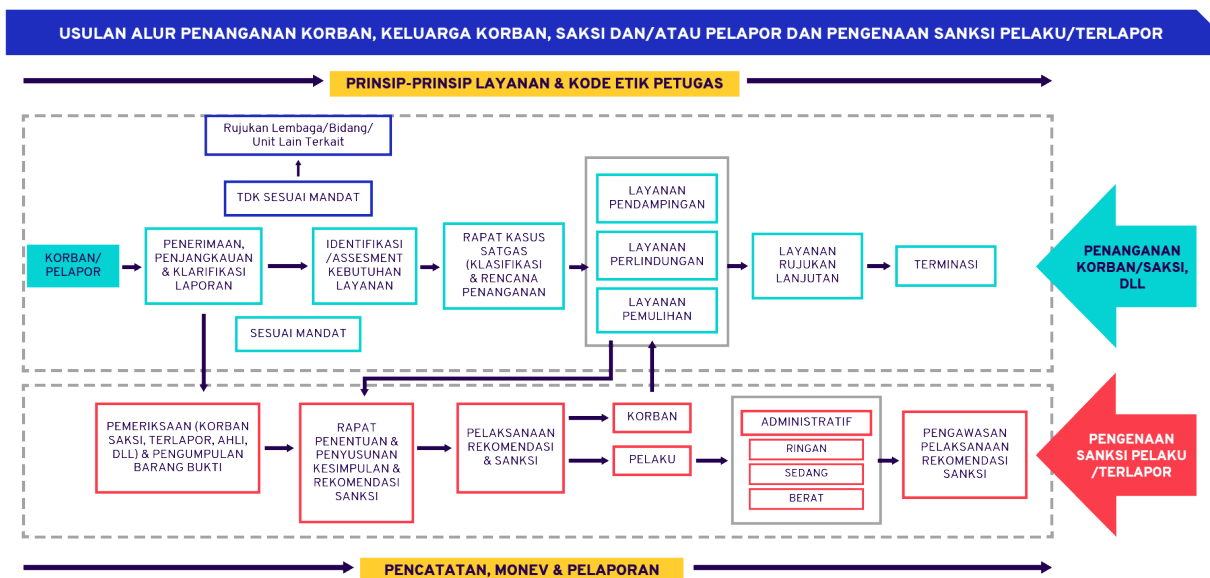
Kelompok ketiga: Menuliskan apa saja POS untuk mendukung Satgas PPKS. POS ini memastikan pelayanan dan rujukan tepat dijalankan dalam pelaksanaan PPKS.

6. Fasilitator memastikan semua kelompok memahami tugas pembahasan dan melakukan klarifikasi jika ada yang bertanya atau membutuhkan informasi.
7. Setelah selesai penugasan kelompok diskusi, peserta dapat menempelkan kertas plano di papan yang tersedia.
8. Selanjutnya fasilitator mempersilahkan peserta untuk presentasi bergantian.
9. Fasilitator menutup sesi dan menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh peserta.

E. Lembar tugas

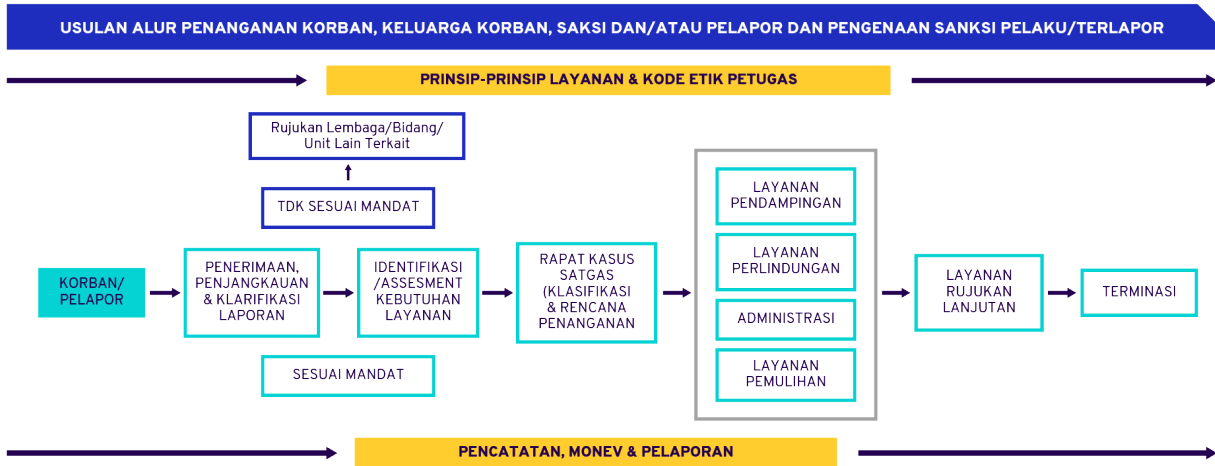
Contoh alur pertama

► Gambar 2. Usulan alur penanganan 1



Contoh alur kedua

► Gambar 3. Usulan alur penanganan 2



F. Lembar bacaan

Sumber bacaan:

1. POS pada masing-masing politeknik.
2. Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 386/P/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

► Tabel 7. Daftar POS

Kelompok POS		
Nomor	Utama	Nama POS
Pengaduan dan penerimaan kasus		
		Layanan pengaduan kasus langsung (tatap muka, WhatsApp (WA))
Pendampingan		
		Layanan identifikasi dan klarifikasi kasus
		Layanan pertolongan pertama psikologis (PFA)
		Layanan rujukan kesehatan
		Layanan konseling

		Layanan informasi hukum
		Layanan rujukan penanganan kasus
		Layanan pendampingan sosial
		Layanan pendampingan untuk penyandang disabilitas
		Pelindungan
		Layanan keamanan dan keselamatan
		Layanan rumah penampungan sementara (asrama) dan rumah aman (rujukan eksternal)
		Pemulihan
		Layanan konseling lanjutan
		Layanan bimbingan rohani/spiritual
		Layanan pemberdayaan diri
		Layanan pemulihan trauma
		Administratif
		Pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti
		Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sanksi
		Pelaksanaan rekomendasi sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat
		Pelaksanaan informasi perubahan perilaku
Nomor	Pendukung	Nama POS
		Pencatatan dan dokumentasi
		Surat tugas tim satgas
		Surat rujukan layanan
		Revisi dan/atau pengembangan POS
		Dokumentasi kegiatan

Nomor	Manajemen	Nama POS
		Pembentukan satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di Kampus
		Jaminan mutu layanan
		Evaluasi kinerja satgas
		Peningkatan kapasitas satgas
Nomor	Lampiran	Keterangan
		Surat keputusan satuan tugas sesuai Permendikbudristek No. 31 Tahun 2021
		Kartu pengenalan tim gugus tugas
		Formulir pengaduan kasus
		Formulir persetujuan korban
		Formulir pendampingan kasus
		Surat rujukan

Pelajaran VIII. Simulasi POS PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

POS sangat penting untuk mendukung kerja-kerja Satgas PPKS. Dengan simulasi akan memudahkan pengambilan keputusan baik pencegahan dan penanganan kasus di perguruan tinggi. POS yang dikembangkan merupakan implementasi dari empat bidang utama yakni pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan sanksi administratif.

A. Tujuan pembelajaran

1. Peserta meningkatkan keterampilan dalam menerapkan pencegahan, pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan sanksi administratif.
2. Memperoleh pemahaman tentang POS dan prinsip pelaksanaannya.
3. Meningkatkan keaktifan dengan melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan untuk meningkatkan kualitas POS.

B. Metode penyampaian

Mempelajari POS, simulasi POS, dan diskusi kelompok.

C. Waktu

135 menit

D. Langkah-langkah kegiatan

1. Fasilitator mengkondisikan kelas untuk mengikuti sesi simulasi dan menayangkan presentasi tentang POS yang telah dikembangkan.
2. Fasilitator meminta peserta untuk memilih satu POS dari masing-masing bidang untuk disimulasikan.
3. Fasilitator meminta peserta terlibat dalam simulasi dengan memilih peran dalam simulasi, di mana setiap peserta dapat bergantian menjadi Satgas PPKS, pelaku, korban, dan sanksi.
4. Bagi peserta yang tidak terlibat dalam simulasi akan mencatat hal-hal penting setiap langkah simulasi termasuk memperbaiki tujuan.
5. Setelah selesai simulasi, peserta akan memberikan umpan balik perbaikan dan catatan untuk jaminan kualitas.
6. Kegiatan simulasi diakhiri setelah seluruh POS yang telah disepakati selesai dipraktikkan.
7. Selanjutnya, fasilitator mengingatkan bahwa perlu ada upaya untuk pencegahan dan berpihak pada kepentingan korban dalam keseluruhan proses simulasi.
8. Fasilitator menutup sesi dan mengucapkan terimakasih atas partisipasinya selama pelatihan tiga hari.

E. Lembar tugas



PERINGATAN PEMICU!

Kasus simulasi POS pengelolaan kasus PPKS

Petunjuk:

Dua puluh tiga kasus dipilih untuk uji coba POS yang telah dikembangkan oleh Satgas PPKS Politeknik. POS merupakan bagian implementasi dari pendampingan, perlindungan, sanksi administratif, dan pemulihan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh fasilitator:

1. Sebelum memulai sesi, fasilitator akan mengkondisikan kelas agar memperhatikan aspek kenyamanan dan kerahasiaan seluruh peserta.
2. Jika terdapat peserta yang tidak bersedia melanjutkan sesi maka fasilitator mempersilahkan peserta meninggalkannya.
3. Terapkan PFA ditengah kegiatan simulasi.

Pencegahan

Kasus 1

Merespons Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi akan dilaksanakan program pencegahan KS di Politeknik. Survei Kemendikbudristek tahun 2020 menyebutkan 77 persen dosen menyatakan

kekerasan seksual pernah terjadi di kampus namun 63 persen tidak pernah melaporkan kasus yang diketahui kepada pihak kampus.

Tugas

- ▶ Lakukan pembahasan bersama oleh Satgas PPKS untuk menentukan sasaran dan bentuk kegiatan pencegahan!
 - ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!
 - ▶ Buatlah sebuah Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)!
 - ▶ Peran apa yang akan dilakukan setiap anggota Satgas PPKS?
-

Kasus 2

Kapasitas/kemampuan tenaga pendidik terkait isu kekerasan seksual dan pencegahan TPKS masih belum merata. Situasi ini hampir tidak terpantau oleh Satgas PPKS. Setiap program studi memiliki 5-7 orang tenaga kependidikan.

Tugas

- ▶ Peran apa yang bisa dimainkan oleh tim Satgas?
 - ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!
-

Kasus 3

Upaya pencegahan TPKS mencakup berbagai organisasi kemahasiswaan, perkumpulan keagamaan di kampus, dan jaringan kerja antar mahasiswa. Beberapa kasus kekerasan telah terjadi dan ditangani sesuai konteks. Untuk mengurangi KBG dan mencegah keberulangan, Satgas PPKS perlu merumuskan beberapa langkah penting bersama organisasi mahasiswa dan jaringan kerja antar mahasiswa.

Tugas

- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS untuk mencegah keberulangan KBG!
 - ▶ Peran apa yang bisa dimainkan oleh tim Satgas? Apakah pesan di atas dapat dikembangkan dalam kegiatan kampanye penyadaran?
-

Kasus 4

Tim Satgas bersama para dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan tugas untuk mengembangkan materi GEDSI dan pencegahan KBG ke dalam berbagai kegiatan kampus. Materi tersebut akan diberikan ke seluruh warga kampus.

Tugas

- ▶ Lakukan pembahasan bersama oleh Satgas PPKS!
- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!
- ▶ Buatlah sebuah Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sesuai POS!

Pendampingan

Kasus 5

Tenaga kependidikan mengalami kejadian tidak nyaman dengan dicolek bagian tubuhnya oleh sesama tenaga kependidikan yang sebenarnya sudah dikenalnya dengan baik. Selain dicolek juga seringkali digoda dan dikomentari fisiknya. Situasi ini membuat tenaga kependidikan tersebut menjadi tidak nyaman karena berada di program studi yang sama. Tenaga kependidikan yang bersangkutan ini mengadukan kepada ketua jurusan dan Satgas PPKS.

Tugas

- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!
-

Kasus 6

Kejadian pelecehan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa saat bimbingan tugas akhir. Mahasiswa ini menangis dan melaporkan kepada tim Satgas PPKS untuk meminta bantuan lebih lanjut.

Tugas

- ▶ Lakukan pembahasan bersama oleh satgas PPKS!
 - ▶ Praktikkan sesuai dengan POS pendampingan!
-

Kasus 7

Pacar saya mempunyai foto aktivitas kami saat kontak fisik (berciuman, saling meraba) dan menyebarkan ke banyak orang ketika kami putus. Foto tersebut juga diberikan komentar yang semakin membuat saya sedih seperti pantat kecil siapa yang masih mau? Payudara tipis gini pasti tidak laku. Semua hal yang digunakan untuk mengintimidasi saya dan sekarang saya makin tertekan di kampus. Saya harus berbuat apa?

Tugas

- ▶ Satgas PPKS merespons kasus di atas sesuai POS pendampingan!
-

Kasus 8

Lis mengalami pelecehan seksual saat pemagangan di perusahaan kapal. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh pekerja kapal sekaligus mentor Iis. Sudah berulang kali Iis menolak ajakan makan siang namun mentor melakukan ancaman kepada Iis jika menolak. Iis diancam akan tidak memperoleh rekomendasi kerja lebih lanjut dan bahkan tidak mendapatkan nilai. Setelah dua kali mendapatkan pelecehan seksual dengan dipaksa melakukan hubungan seks, Iis sangat ketakutan dan memutuskan untuk berbicara dengan dosen pembimbingnya.

Tugas

- ▶ Lakukan pembahasan bersama oleh Satgas PPKS untuk tata kelola kasus sesuai POS pendampingan!
 - ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!
-

Kasus 9

Tenaga kependidikan rutin datang pagi hari dan situasi kampus masih sepi. Kejadian pelecehan hingga hampir diperkosa dapat terjadi jika tidak ada mahasiswa yang datang untuk meminta kartu tugas praktik. Pelaku adalah dosen senior di kampus dan terkenal sangat ramah di kalangan warga kampus.

Tugas

- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS untuk pendampingan yang sesuai.
-

Kasus 10

Seorang dosen senior perempuan di kampus menerima pelecehan dari petugas keamanan yang membantu untuk membawakan dokumen-dokumennya secara rutin ke ruang kerja. Dosen ini menyalahkan dirinya sendiri dan menarik diri dari sosialisasi. Beliau tidak percaya bahwa dia menerima pelecehan dari petugas keamanan. Malu, takut, tidak nyaman, dan tidak tahu harus melaporkan kepada siapa. Beliau mengadukan kepada teman baiknya dan berharap petugas keamanan tersebut bisa dipecat.

Tugas

- ▶ Lakukan pembahasan bersama oleh satgas PPKS!
 - ▶ Praktikkan sesuai dengan POS pendampingan!
-

Kasus 11

Petugas kebersihan kampus sedang membersihkan kamar mandi dan mendapatkan pelecehan dari petugas keamanan. Selain dilecehkan, petugas kebersihan ini seringkali diintimidasi dan bahkan akan dilaporkan dengan tuduhan tidak disiplin. Apa yang bisa dilakukan oleh petugas kebersihan yang setiap hari merasa ketakutan karena perilaku yang dilakukan oleh rekan sekerjanya pada bagian keamanan?

Tugas

- ▶ Lakukan pembahasan bersama oleh Satgas PPKS!
- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS pendampingan!

Kasus 12

Kawan kami mengalami disabilitas dengan kaki yang harus diseret ketika berjalan. Kawan kami ini sering digunjingkan dan mendapatkan komentar yang tidak menyenangkan dari sesama mahasiswa. Beberapa hari yang lalu kawan kami mengadukan kepada kami bahwa salah satu mahasiswa memasukan lem ke dalam sepatunya sehingga kesulitan berjalan. Sebagai mahasiswa kami menyampaikan kejadian ini ke Satgas PPKS yang mahasiswa.

Tugas

- ▶ Lakukan pembahasan bersama oleh Satgas PPKS!
 - ▶ Praktekkan sesuai dengan POS Pendampingan!
-

Pelindungan**Kasus 13**

Beberapa mahasiswa telah menjadi korban pelecehan dari dosen termasuk mendapatkan ancaman nilai kecil pada mata kuliahnya. Para dosen lain sudah mengetahui dan telah melaporkan ke ketua jurusan. Salah satu korban trauma dan hampir dua bulan tidak kuliah dan mengurung diri di indekos hingga orang tuanya mencarinya. Akhirnya tim Satgas PPKS melakukan pendekatan dan menerapkan intervensi POS perlindungan dengan merujuk korban ke rumah aman yang dikelola oleh DP3A Provinsi terlebih dahulu untuk keamanan dan intervensi kesehatan mentalnya.

Tugas

- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!
- ▶ Buatlah surat rujukan dan mekanisme rujukan lebih lanjut.

Kasus 14

Kekerasan dalam pacaran. Saya mengalami kekerasan dari pacar saya dan pacar saya memaksa saya melakukan hubungan seksual. Kalau saya menolak, saya dipukul dan dipaksa minum air yang sudah diberikan obat perangsang. Pacar saya juga sering menggunakan shabu dan memeras saya agar memberikan dia uang untuk beli shabu. Saya sungguh tidak tahan dengan perilakunya dan sudah sejak tahun lalu saya memutuskan hubungan. Saya ke kampus berangkat lebih awal dan selalu berada di keramaian agar banyak orang bisa melindungi saya secara tidak langsung. Namun dia selalu menunggu di kampus untuk menjemput dan bahkan menjebak saya untuk bersedia pulang bersamanya. Saya ingin menghentikan dan tidak mau kejadian ini berulang menimpa saya.

Tugas

- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!

Kasus 15

Sebagai saksi, saya membantu korban melaporkan ke Satgas PPKS kasus pornografi melalui foto tidak senonoh yang dilakukan oleh kawan dekat korban. Namun kini, saya seringkali diteror oleh pelaku dan kawan-kawan pelaku dengan memberikan label ke saya feminis karbitan, perawan tua, dan sebagainya. Saya harus menghadapi mereka di tempat parkir, kantin, dan bahkan di lorong kampus. Beberapa waktu yang lalu saya berani melawan langsung, namun tenaga saya terbatas dan saya meminta bantuan Satgas PPKS menghadapi mereka.

Tugas

- ▶ Tim Satgas PPKS melakukan pembahasan bersama soal perlindungan saksi.
- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!

Kasus 16

Saya ini korban pelecehan sesama mahasiswa pengurus BEM. Proses saya telah ditangani oleh pihak kampus dan bahkan pelaku telah diberikan sanksi hingga pelaku menghentikan pendidikannya sendiri. Namun saya masih tidak nyaman ke kampus karena pandangan dan komentar pengurus BEM lainnya dan kawan-kawan pelaku kepada saya yang dianggap membuat pelaku tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Saya melaporkan hal ini kepada tim Satgas PPKS atas kejadian yang menimpa saya karena stigma kekerasan seksual yang saya alami.

Tugas

- ▶ Tim Satgas PPKS melakukan pembahasan bersama soal perlindungan.
- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!

Penaan Sanksi Administratif

Kasus 17

Saat itu mahasiswa OJT (Praktik Kerja Lapangan). Dosen pendamping seringkali datang ke tempat indekos dan mereka berdua sering berinteraksi (ngobrol bersama) hingga terjadi pelecehan seksual fisik. Orang tua korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke kampus dan ditujukan langsung kepada Direktur. Direktur memberitahukan kepada tim Satgas PPKS untuk menindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemberian sanksi yang sesuai. Proses penyelidikan dilakukan dan terbukti bahwa dosen pendamping adalah pelaku pelecehan kekerasan seksual kepada mahasiswa. Bagaimana penerapan sanksi administratif pada pelaku? Silahkan kembangkan penanganan kasus ini.

Tugas

- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!

Kasus 18

Petugas keamanan diketahui melakukan tindak kekerasan seksual dan diskriminasi kepada seorang petugas kebersihan di lingkungan kampus. Petugas kebersihan ini memiliki disabilitas kelainan pendengaran sehingga prosesnya perlu dibantu oleh juru bahasa isyarat. Oleh Satgas PPKS telah dilakukan pemeriksaan kepada pelaku dan melaporkan kepada direktur bahwa kejadian pelecehan seksual dengan memaksa petugas kebersihan memenuhi hasrat seksual benar-benar terjadi.

Tugas

- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!
-

Kasus 19

Seorang mahasiswa terbukti telah melakukan intimidasi dan pelecehan seksual kepada mahasiswa lainnya. Pelecehan yang dilakukan adalah merekam mahasiswi di toilet dan di ruang ganti. Hasil foto dan video digunakan untuk memeras dan mengintimidasi mahasiswa karena berhasil mengambil gambar saat berada di toilet dan ruang ganti.

Tugas

- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!
-

Kasus 20

Ini pengalaman saya sendiri dan terjadi di kampus saya dan hanya teman saya yang tahu hal ini. Suatu hari saya ke kampus untuk mengurus proposal dan saya lupa membawa STNK motor. Sesuai aturannya mahasiswa yang tidak membawa STNK maka harus menyerahkan KTM atau KTP, kemudian saya menyerahkan KTP ke petugas satpam kampus. Besoknya saya mengambil KTP dan biasanya satpam hanya memfoto plat motor atau KTP saya, tetapi ini malah yang di foto bukan plat motor saya, tetapi kamera HP satpam justru diarahkan menuju ke badan saya, dan satpam lainnya malah menertawakan saya. Saya menjadi takut dan kemudian pergi menuju ke kantor. Tetapi, satpam tersebut masih mengikuti saya dengan merekam video dan saya semakin ketakutan.

Tugas

- ▶ Lakukan pembahasan oleh Satgas PPKS
 - ▶ Praktikkan sesuai dengan POS tentang sanksi administrasi!
-

Pemulihan**Kasus 21**

Pelaku adalah kakak kelas korban. Kejadiannya waktu mereka selesai melakukan kegiatan kemahasiswaan dan korban diantar pulang oleh pelaku. Pada saat di perjalanan yaitu di atas

kendaraan, pelaku mengambil tangan korban dan meletakkan tangan korban di kemaluan pelaku. Korban langsung menolak dan menarik tangannya dan tidak suka dengan sikap pelaku tersebut. Pelaku berhenti dan mengajak korban beristirahat sebentar. Pada saat berhenti tersebut, pelaku justru semakin berani dan agresif dengan berusaha mencium korban. Korban tetap menolaknya. Setelah korban sampai di rumah dan pelaku juga sudah sampai di indekosnya, pelaku melakukan panggilan video kepada korban sambil melakukan masturbasi (onani).

Tugas

- ▶ Bimbingan psikologi apa yang dapat diberikan dalam kasus ini?
 - ▶ Praktekkan sesuai dengan POS!
-

Kasus 22

Saya mahasiswa laki-laki dan saya terkesan lembut oleh sebagian orang. Setiap hari saya sering dikata-katain banci oleh kawan-kawan kampus. Saya cuek saja karena ini memang real diri saya. Saya tidak bisa berpura-pura terlihat gagah karena memang karakter saya yang lembut dan gemulai. Namun intimidasi oleh kawan-kawan laki-laki kepada saya luar biasa dengan terus memaki saya sebagai simbol laki-laki sakit, laki-laki lemah dan kadangkala menyebut saya banci. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menolong diri saya sendiri? Dan apa yang bisa Satgas PPKS lakukan untuk menghentikan diskriminasi yang terjadi pada diri saya dan mungkin orang-orang seperti saya?

Tugas

- ▶ Penanganan psikologis, sosial, dan advokasi apa yang dapat diberikan dalam kasus ini?
 - ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!
-

Kasus 23

Saya tenaga kependidikan dan pernah mendapatkan pelecehan seksual dari sesama tenaga kependidikan. Kami sudah dipisahkan dan dipindahkan ke prodi yang berbeda sehingga kami tidak pernah bertemu. Namun saya terus dihantui rasa takut, trauma, dan setiap kali melihat gedung di mana kejadian itu terjadi. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat situasi kembali seperti sedia kala?

Tugas

- ▶ Praktikkan sesuai dengan POS!

F. Lembar bacaan

Bahwa dalam rangka optimalisasi penyediaan layanan oleh Satgas PPKS diperlukan POS untuk pencegahan dan penanganan serta menjamin perlindungan, pemenuhan hak, serta pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan.

Sumber bacaan:

1. POS pada masing-masing politeknik.
2. Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 386/P/2019 tentang POS Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengakhiran pelatihan

Materi terakhir ini adalah bagian akhir dari pelatihan pengarusutamaan GEDSI dan penerapan PPKS dari proses membaca materi panduan hingga pelajaran kedelapan. Proses pengakhiran pelatihan diawali dengan tes akhir terlebih dahulu, membuat rencana tindak lanjut individual, dan penutupan.

Tes Akhir, Rencana Tindak Lanjut, Evaluasi, dan Penutup

Tes akhir

1. Pelaksanaan tes akhir sebelum penutupan kegiatan.
2. Pastikan seluruh peserta mendapatkan lembar soal tes akhir atau mengisi tautan yang ada.
3. Setelah semua mendapatkan lembar soal tes akhir, tes bisa dimulai.
4. Waktu yang diberikan 20 menit.
5. Setelah semua sudah, soal yang terisi dikumpulkan dan dihitung. Hal yang sama juga untuk tes yang dilakukan dengan mengisi tautan. Pastikan semua telah mengerjakan tes awal dan mengumpulkan/mengirimkannya.
6. Absen cepat dengan menghitung jumlah peserta sesuai dengan kehadiran.

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

1. Fasilitator membagi format RTL kepada seluruh peserta pelatihan.
2. RTL ini bersifat pribadi untuk mendukung program kerja tim GEDSI dan/atau Satgas PPKS.
3. Fasilitator memastikan bahwa penyusunan RTL penting untuk menunjukkan komitmen pribadi pada pengarusutamaan GEDSI dan PPKS.
4. Fasilitator membagikan lembar RTL atau tautan yang telah disediakan.
5. Seluruh peserta mengisi RTL dan menyimpan hasil RTL untuk peningkatan kapasitas pribadi.

► Tabel 8. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut pribadi	
Strategi apa saja yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kapasitas saya dalam mendukung GEDSI dan PPKS	
Kekuatan saya sebagai individu untuk mendukung GEDSI dan PPKS	
Pengetahuan GEDSI dan PPKS apa yang perlu saya tingkatkan?	
Tiga hal prioritas yang akan saya lakukan untuk mendukung lingkungan yang kondusif.	

▶ Evaluasi

1. Bagikan lembar evaluasi pelatihan.
2. Pastikan seluruh peserta memberikan umpan balik evaluasi.
3. Waktu yang diberikan 10 menit.
4. Setelah semua memberikan evaluasi, fasilitator menyerahkannya kepada panitia untuk penutupan.

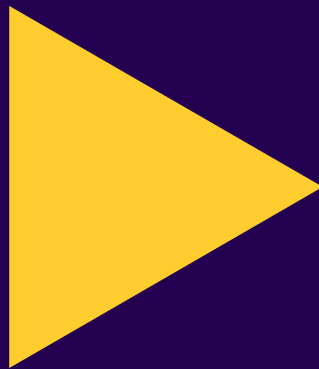
▶ Penutupan

1. Fasilitator dan penyelenggara pelatihan mempersiapkan prosesi penutupan acara.
2. Fasilitator dan panitia menentukan tiga orang peserta terbaik selama pelatihan berdasarkan hasil tes.
3. Penutupan kegiatan dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi.
4. Setelah selesai prosesi penutupan, penyelenggara pelatihan dapat mengambil alih kegiatan dengan pengumuman-pengumuman yang sifatnya administratif.

▶ Daftar pustaka

- BAPPENAS, MAHKOTA, KOMPAK. (2021). *COVID-19 Impacts on People with Disabilities in Indonesia: An In-depth Look*.
- GESI Working Group. (2017). *A Common Framework for Gender Equality & Social Inclusion*. Nepal: International Development Partners Group.
- ILO, ARM – LFS – Household Labour Force Survey.(2018). Armenia.
- ILO-Skills for Prosperity in South-East Asia Programme-Kedutaan Inggris. (2022). *Pedoman dan Manual "Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan, dan Kerentanan HIV AIDS pada Pelaut Perempuan, Kelompok Pelaut Perempuan, dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim"*. Indonesia.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- PSHK. (2021). *Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia*.
- Santoso, W.M. (2016). *Penelitian dan pangarusutamaan gender: sebuah pengantar*. Jakarta: LIPI Press.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- UNICEF. (2020). *Gender-Age Sensitive Social Protection: A Conceptual Framework*. Innocenti Working Papers, no. 2020-10. Innocenti, Florence.

Memajukan keadilan sosial, mempromosikan kerja layak



**International Labour Organization (ILO)
Jakarta Office**

Menara Thamrin Lt. 22
Jalan MH Thamrin Kav. 3
Menteng, Jakarta Pusat
Jakarta 10250
Telp. 021 3913112

▶ ilo.org/jakarta